

LAPORAN PENELITIAN FUNDAMENTAL



JUDUL

Adopsi Pendekatan Integrated Collaboration Environment guna percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Indonesia

TIM PENYUSUN

DR. Sri Juni Woro Astuti, M.Com.

DR. Sayekti Suindyah D, M.Si.

Suryo Atmojo, ST., MT.

Masfufa Zulfa Khusna

Yanesty Ayu Pitaloka

**PROGRAM HIBAH RISET FUNDAMENTAL PENDANAAN TAHUN 2023
KEMENDIKBUDRISTEK**

UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hinayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Penelitian Hibah Fundamental tahun 2023 tahun pertama yang berjudul: Adopsi Pendekatan Integrated Collaboration Environment guna percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Indonesia

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek yang telah mendukung dan memfasilitasi dalam bentuk dana hibah penelitian sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan penelitian dan menyusun Laporan Penelitian sebagaimana yang diharapkan.

Selanjutnya ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada Pimpinan Universitas Wijaya Putra dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Wijaya Putra yang telah memberi dukungan semangat agar Tim kami dapat melaksanakan penelitian ini dengan sebaik-baiknya.

Harapan kami hasil penelitian ini dapat menambah khasanah kajian dan menjadi bahan rujukan bagi penelitian lain yang relevan di bidang manajemen publik khususnya terkait dengan Kebijakan pengelolaan stunting di Indonesia.

Menyadari bahwa Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi sempurnanya Laporan ini dan semoga usulan penelitian untuk tahun kedua dapat kembali lolos pendanaan hibah Ristekdikti tahun 2024.

Surabaya, 20 November 2023

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	ii
Ringkasan	iii
Lembar Pengesahan	iv
Bab 1 Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang dan Perumusan Masalah	1
1.2. Pendekatan Penyelesaian Masalah	2
Bab 2 Tinjauan Pustaka	3
Bab 3 Metode Penelitian	5
Bab 4 Hasil dan Pembahasan	8
4.1. Kebijakan dan Tatakelola pencegahan stunting level provinsi	8
4.2. Analisis Peran Stakeholders dalam pencegahan stunting	17
4.3. Prevalensi Stunting di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur	23
4.4. Masalah/kendala dalam pencegahan dan penanganan stunting	25
4.5. Perlunya Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi dalam pencegahan dan penanganan stunting	27
4.6. Model Sistem Informasi Manajemen Terpadu Penanganan Stunting	36
4.7. Rencana Tahap Berikutnya	47
Bab 5 Simpulan	48
Daftar Pustaka	50

Ringkasan

Prevalensi stunting di Indonesia masih tinggi (24,4%) di atas toleransi yang ditetapkan WHO maksimal 20%. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah dan menargetkan agar pada tahun 2024 turun menjadi 14%. Kendala yang dihadapi dalam mencegah stunting tidak hanya masalah finansial masyarakat yang relative rendah. Masalah yang lebih mendasar justru terletak pada tatakelola program pencegahan *stunting* yang belum efektif; belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif di semua tingkatan terkait perencanaan dan penganggaran, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi; Belum efektif dan efisiennya pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya dan sumber dana. **Urgensi** penelitian ini untuk memberi solusi terhadap masalah yang dihadapi tersebut sehingga penanganan stunting di Indonesia benar-benar efektif. **Tujuan** penelitian adalah untuk mendeskripsikan tatakelola penanganan stunting saat ini, memetakan peran pemangku kepentingan dalam pencegahan dan penanganan stunting, mengembangkan model tatakelola penanganan stunting yang lebih efektif. **Luaran tahun-1:** 1) Dokumen kondisi eksisting tatakelola penanganan stunting, 2) dokumen pemetaan peran pemangku kepentingan, 3) dokumen pemetaan masalah, 4) Rancangan model konseptual penanganan stunting dgn mengadopsi konsep *integrated collaboration*, 5) publikasi artikel pada Jurnal Nasional terindeks Sinta 2 *Policy and Governance Review*. **Luaran tahun ke-2:** 1) model *integrated collaboration* dlm pencegahan dan penanganan stunting yg sdh tervalidasi, 2) Dokumen naskah kebijakan pencegahan dan penanganan stunting berbasis *integrated collaboration*, 3) Publikasi artikel pada jurnal Internasional Terindex Scopus International Journal of Electronic Governance, 4) HAKI, 5) Buku Monograf ber ISBN) diterbitkan oleh Penerbit KYTA anggota IKAPI

Kata Kunci:

Prevalensi_stunting; *integrated_collaboration*; Governance; Effectiveness

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : Adopsi Pendekatan Integriated Collaboration guna percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Indonesia

Bidang Unggulan : Pemerintahan Daerah dan Desa

Topik Penelitian : Tata Kelola Organisasi Sektor Publik

Ketua Peneliti :

a. Nama Lengkap : Dr. Sri Juni Woro Astuti, M.Com.

b. NIDN : 0709066602

c. Jabatan Fungsional : Lektor

d. Program Studi : Ilmu Administrasi Publik (S2)

e. Nomor HP : 082233565660

f. Alamat surel : srijuniworo@uwp.ac.id

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Dr. Sayekti Suindyah D., M.Si.

b. NIDN : 0704086703

c. Perguruan Tinggi : Universitas Wijaya Putra

Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap : Suryo Atmojo, ST., M.T.

b. NIDN : 0709018901

c. Perguruan Tinggi : Universitas Wijaya Putra

Biaya Penelitian : Rp.209.600.000,-

Surabaya, 17 November 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Dr. Hadi Susanto, MM.
NIDN. 0020095803

Ketua Peneliti,

Dr. Sri Juni Woro Astuti, M.Com.
NIDN. 0709066602



Menyetujui,
Ketua LPPM

(Dr. Nu Prho Mardi Wibowo, S.E., M.Si.)
NIP/NIK 196905062005011004

Bab 1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang dan Rumusan Permasalahan

Stunting telah menjadi masalah bersama oleh banyak negara. Laporan “*UNICEF, WHO, World Bank Group Joint Malnutrition Estimates, 2021 Edition*” pada April 2021 menunjukkan bahwa terdapat 149,2 juta balita atau 22% dari total balita di seluruh dunia mengalami stunting di tahun 2020 (1). Di Indonesia, angka prevalensi stunting anak balita menunjukkan trend penurunan sejak tahun 2013 sebesar 37,2% hingga tahun 2022 sebesar 21,6 % (2) . Namun ini berarti 1 dari 4 anak balita Indonesia, atau lebih dari 8 juta anak mengalami stunting. Data anak-anak yang mengalami stunting tersebar pada seluruh wilayah di Indonesia.

Kasus stunting tidak hanya berada pada wilayah yang terluar, terdepan dan tertinggal, tetapi juga terdapat pada wilayah perkotaan yang tingkat pendidikan dan pendapatannya relatif tinggi. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi isu stunting di Indonesia. Banyak kebijakan, regulasi dan program telah dibuat pemerintah guna percepatan penanggulangan stunting dan perbaikan gizi di Indonesia namun belum begitu terlihat manfaatnya. Pendidikan atau pengetahuan mengenai cara hidup sehat, sanitasi yang baik, ataupun mengenai makanan bergizi sudah diajarkan sejak pendidikan tingkat dasar. Namun faktanya masih banyak masyarakat Indonesia yang bahkan belum mengerti apa itu stunting sehingga sulit mendeteksi anak stunting karena kejadiannya tidak disadari. Pencegahan stunting juga melalui kegiatan Posyandu di desa dan kelurahan yang dilakukan oleh ibu-ibu kader PKK.

Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dalam Wagino (2022) (3) **permasalahan** tingginya stunting dikarenakan: a) Belum efektifnya program-program pencegahan *stunting*. b) Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif di semua tingkatan terkait perencanaan dan penganggaran, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi. c) Belum efektif dan efisiennya pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya dan sumber dana. d) Keterbatasan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan program. e) Masih minimnya advokasi, kampanye, dan diseminasi terkait stunting, dan berbagai upaya pencegahannya. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka kajian untuk

mengoptimalkan koordinasi dan integrasi penanganan stunting di Indonesia sangat diperlukan. Dengan demikian **perumusan masalah** dalam penelitian ini adalah : a) Bagaimana tatakelola penanganan stunting di pemerintah daerah dan desa; b) Bagaimana peran para pihak yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan stunting; c) Bagaimana model tatakelola penanganan stunting yang efektif.

1.2. Pendekatan Pemecahan Masalah

Koordinasi pencegahan dan penanganan stunting antar instansi masih lemah. Distribusi alokasi anggaran yang menyebar di berbagai instansi menjadi tidak efisien dan tidak efektif. Oleh karenanya pendekatan yang ditawarkan untuk meningkatkan efektivitas penanganan stunting adalah dengan mengadopsi konsep kolaborasi terintegrasi (*integrated collaboration*).

Bab 2

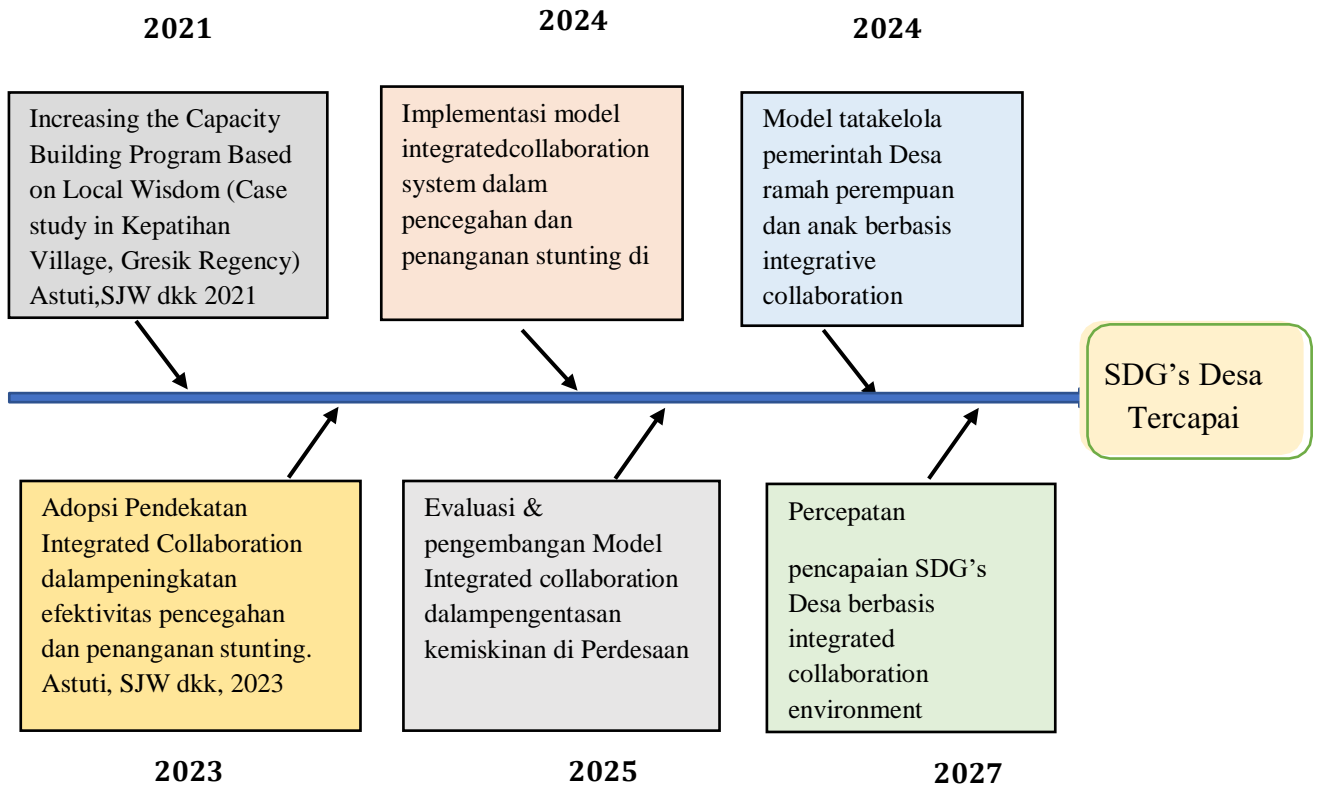
Tinjauan Pustaka

Integrated collaboration dalam penelitian ini mengadopsi konsep *Integrated Collaboration Environment* (ICE) yaitu konsep kerja berbasis digital mengacu pada lingkungan tempat tim virtual bekerja. Lingkungan tersebut memungkinkan perusahaan untuk mewujudkan sejumlah keunggulan kompetitif dengan menggunakan komputer dan infrastruktur jaringan untuk kolaborasi kelompok maupun individu sehingga dapat lebih efisien (4). Manfaat ini dicapai melalui kerjasama lintas disiplin dan departemen, dengan pegawai yang berpengetahuan sehingga berbagi informasi penting untuk memastikan tujuan perusahaan dibagi di seluruh departemen dan terintegrasi sepenuhnya.

Penelitian ini menawarkan pendekatan ICE untuk memastikan bahwa setiap instansi yang menjalankan program penanganan stunting lebih terkoordinasi dengan basis data tunggal, satu sama lain dapat mengontrol program yang telah dijalankan serta mengevaluasi hasilnya secara akurat. Pendekatan ICE ini berkembang di kalangan privat semenjak adanya pandemic covid-19 (5), sehingga sejauh ini belum ada kajian tentang penggunaan pendekatan ICE di sektor publik dan pemerintahan. Pendekatan ini merupakan pengembangan konsep *collaborative governance* yang banyak diterapkan di sektor publik.

Aspek kolaborasi dalam *collaborative governance* yang dipopulerkan oleh Ansell dan Gash (2007) lebih pada aspek perumusan dan implementasi kebijakan publik (6). Sedangkan gagasan Agranoff dan McGuire (2009) menekankan pada lingkup yang lebih general yakni penyelenggaraan pemerintah secara keseluruhan (7). Kajian *collaborative governance* dalam penanganan stunting yang menyatakan sudah berhasil (8). Sementara yang menunjukkan hasil kurang optimal antara lain (9); (10); (11); (12); (13). Prasetyo, A. dkk (2023) menyarankan perlunya integrasi dalam penanganan stunting di tingkat pemerintah daerah (14). Namun kajian tersebut masih bersifat konseptual awal, perlu difokuskan pada pengembangan infrastruktur pengintegrasian program penanganan stunting yang konkrit dan operasional sebagaimana yang akan dilakukan pada penelitian ini.

Peta Jalan (Road map) penelitian 5 tahun kedepan



Bab 3

Metode Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu dua tahun. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Lokasi penelitian ditentukan secara purposif yaitu di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur. Dipilihnya kedua lokasi tersebut secara purposif, dengan pertimbangan NTT memiliki tingkat prevalensi stunting 35,3% tertinggi di Indonesia dan Jawa Timur memiliki 651.708 kasus (14), terbanyak kedua setelah Jawa barat.

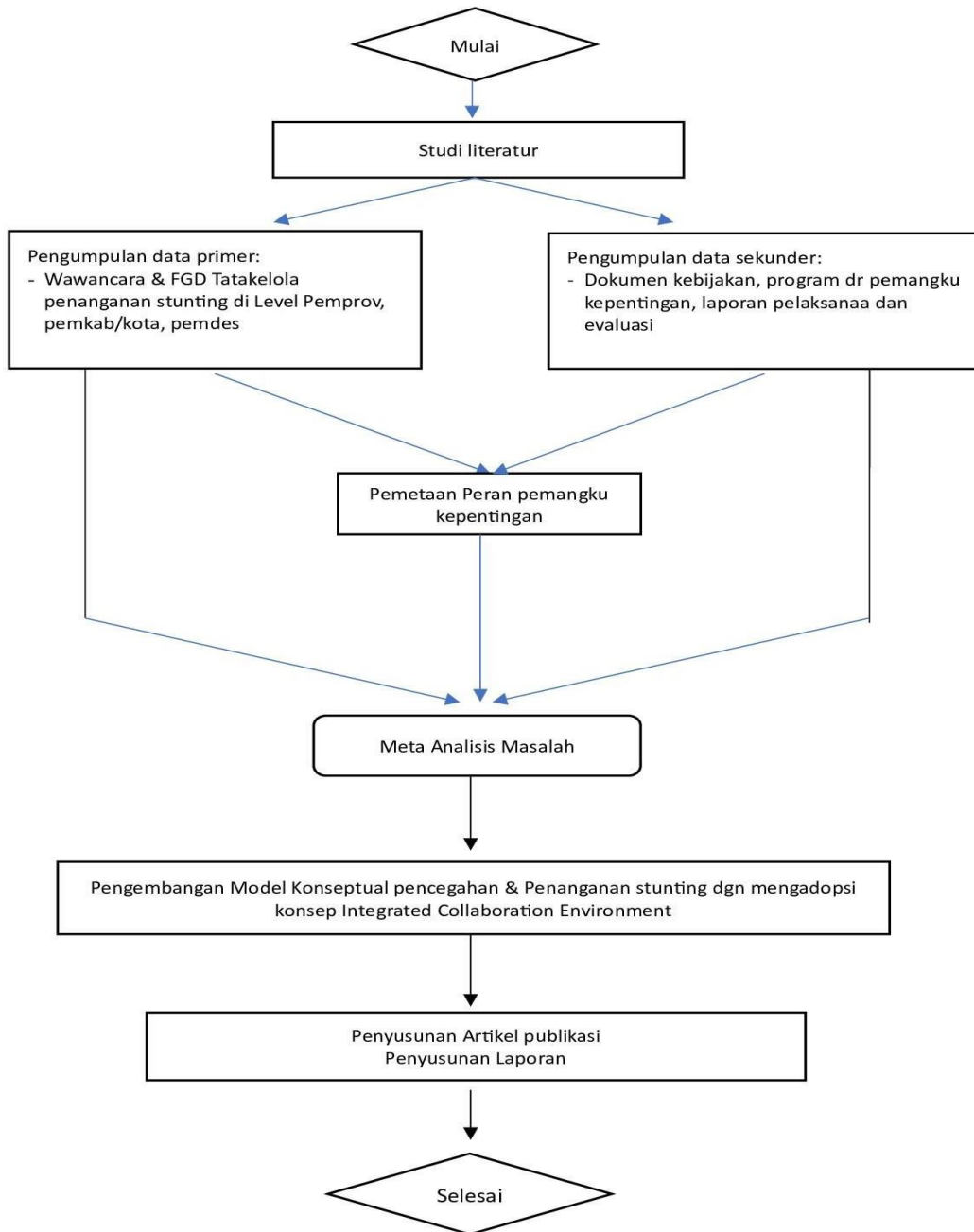
Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan FGD. Adapun data sekunder diperoleh melalui literatur review dari hasil penelitian terdahulu, publikasi media online, dan dokumen-dokumen yang ada di masing-masing pemangku kepentingan. Wawancara dan FGD melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) yang terlibat langsung dalam pencegahan dan penanganan stunting baik di level provinsi, kabupaten/kota dan desa yang ditentukan secara purposive. Analisis data primer menggunakan metode analisis kualitatif interaktif dan meta analisis untuk data sekunder. Secara detail pentahapan penelitian diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Pelaksanaan Penelitian	Teknik Pengumpulan Data, Sumber Data	Metode Analisis Data	Output	Indikator Capaian
Tahun I				
1) Mengidentifikasi Tatakelola pencegahan stunting di level provinsi, kabupaten dan desa	Observasi, penelusuran data sekunder, Indepth interview. Informan: Stakeholder dalam penanganan stunting di Provinsi NTT dan Jatim (BAPPEDA, Dinkes, Dinsos, BPMD, Pemdes, dll), sampel kabupaten/kota dan desa	Analisis Deskriptif kualitatif	Deskripsi tatakelola pencegahan dan penanganan stunting di level provinsi, kabupaten/ kota dan desa	Tersedianya dokumen deskripsi tatakelola pencegahan dan penanganan stunting
2) Memetakan dan menganalisis peran stakeholders dlm pencegahan stunting	Indepth interview. Informan: Stakeholder dalam penanganan stunting di Provinsi NTT dan Jatim (BAPPEDA, Dinkes, Dinsos, BPMD, Pemdes, dll), sampel	Analisis Deskriptif kualitatif	Hasil pemetaan peran stakeholders dalam pencegahan	Dokumen Hasil pemetaan peran stakeholders dalam pencegahan dan penanganan stunting

	kabupaten/kota dan desa			
3) Melakukan metaanalisis masalah	Data Primer dan sekunder	Meta analisis	Pemetaan masalah/kendala dalam pencegahan penanganan stunting	Dokumen Pemetaan masalah/ kendala dalam pencegahan dan penanganan stunting
4) Pengembangan model konseptual integrated collaboration dlm pencegahan dan penanganan stunting	FGD dengan stakeholders, hasil meta analisis permasalahan	Analisis Interaktif, Analisis Deskriptif, Konsultasi pakar (peer review)	Rancangan model konseptual penanganan stunting dgn mengadopsi konsep integrated collaboration	Tersedianya Rancangan model konseptual penanganan stunting dgn mengadopsi konsep integrated collaboration
Tahun II				
1) Validasi dan Diseminasi model konseptual	FGD dengan stakeholders tingkat provinsi, kab/kota, dan desa	Peer review, expert review, stakeholders	Model integrated collaboration dlm pencegahan dan penanganan stunting	Tersedianya model integrated collaboration dlm pencegahan dan penanganan stunting yg sdh tervalidasi
2) Mengidentifikasi aspek penting yang dipertimbangkan untuk menyusun naskah kebijakan	Indepth Interview dan FGD dengan stakeholders tingkat provinsi, kab/kota, dan desa	Analisis Interaktif, Analisis Deskriptif dan Analisis ISM (Intepretatif Structural Modelling)	Dokumen database aspek penting kebijakan terkait strategi pencegahan dan penanganan stunting	Tersedianya Dokumen database aspek penting kebijakan terkait strategi pencegahan dan penanganan stunting
3) Menyusun naskah kebijakan	Dokumen Tatakelola, pemetaan peran stakeholders, pemetaan masalah, data base aspek penting	Kualitatif, meta analisis, diskusi stakeholders	Draft naskah kebijakan pencegahan dan penanganan stunting berbasis integrated collaboration	Dokumen draft naskah kebijakan pencegahan dan penanganan stunting berbasis integrated collaboration
4) Uji pakar naskah kebijakan	-	Review pakar, diskusi stakeholders	Naskah kebijakan yang sudah diuji oleh pakar	Dokumen Berita acara uji pakar terhadap naskah kebijakan pencegahan dan penanganan

				stunting berbasis integrated collaboration
--	--	--	--	--

Adapun dalam pelaksanaan tahapan penelitian tersebut di atas dapat diuraikan dalam Bagan Alir penelitian berikut ini:



Bab 4

Hasil Dan Pembahasan

4.1. Kebijakan dan Tatakelola pencegahan stunting level provinsi

Stunting menjadi salah satu indikator kurang berhasilnya Pembangunan yang ditandai dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa prevalensi stunting memiliki kausalitas dengan tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Sebagaimana penelitian [1] (Kustanto, 2021) menunjukkan prevalensi stunting berkorelasi langsung terhadap kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebesar 0,02%. Kemiskinan berpengaruh langsung terhadap prevalensi stunting dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang sebesar 0,06%. Persentase kemiskinan penduduk di luar Pulau Jawa, termasuk Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, juga lebih tinggi dibandingkan Pulau Jawa. Oleh karenanya penanganan tingginya prevalensi stunting perlu difokuskan di seluruh provinsi di Indonesia.

Sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mempercepat penurunan stunting di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Perpres ini merupakan payung hukum bagi Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan Stunting yang telah diluncurkan dan dilaksanakan sejak tahun 2018. Perpres ini juga untuk memperkuat kerangka intervensi yang harus dilakukan dan kelembagaan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting ini dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.

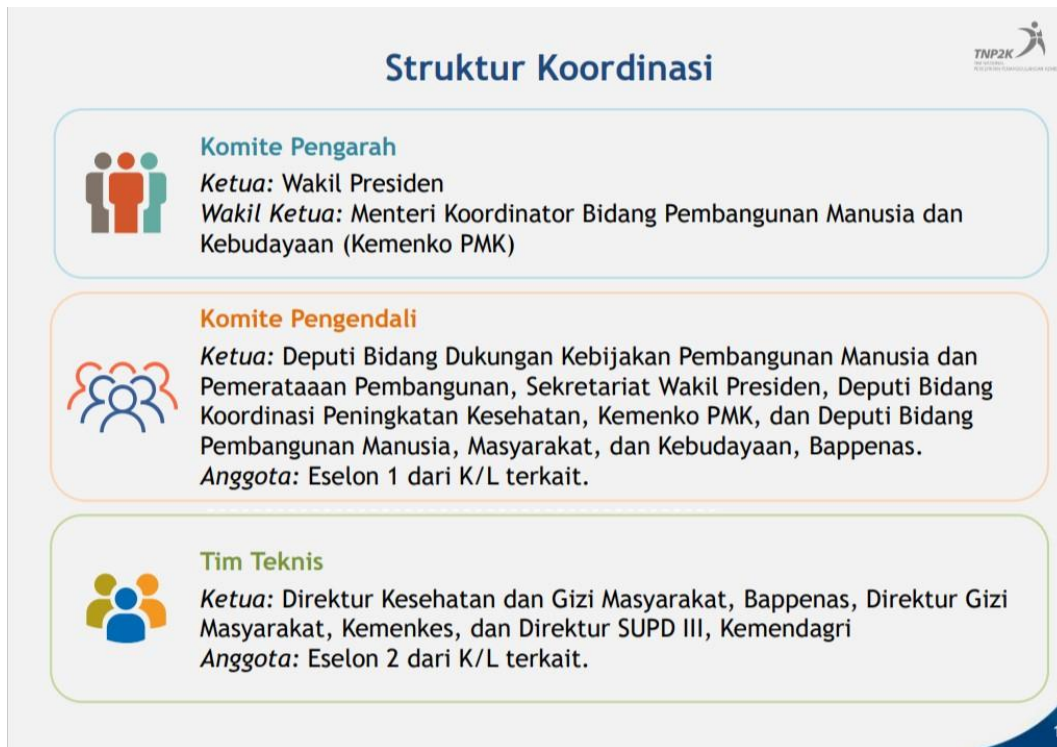
Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perpres tersebut, bertujuan untuk: a. menurunkan prevalensi Stunting; b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga; c. menjamin pemenuhan asupan gizi; d. memperbaiki pola asuh; e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Adapun kelompok sasaran dalam program percepatan penurunan stunting meliputi: a. remaja; b. calon pengantin; c. ibu hamil; d. ibu menyusui; dan e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi Stunting sebagaimana dituangkan dalam Perpres nomor 72 tahun 2021 tersebut, Pemerintah menetapkan target antara penurunan prevalensi stunting 14 persen di tahun 2024. Adapun untuk target nasional prevalensi Stunting dalam kurun waktu tahun 2025-2030 ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024.

Pemerintah juga menetapkan lima pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagai landasan pencapaian target dan tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030, meliputi:

1. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
2. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
3. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
4. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
5. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 juga menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat nasional yang terdiri dari Pengarah dan Pelaksana. Ketua Pengarah adalah Wakil Presiden yang didampingi oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta menteri-menteri lainnya. Sedangkan, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ditunjuk menjadi Ketua Pelaksana. Tim Percepatan Penurunan Stunting juga dibentuk di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan. Berikut struktur koordinasi Tim Percepatan penurunan stunting di Tingkat Pusat:



Gambar 1. Struktur Koordinasi TPPS Pusat

Sebagai tindak lanjut dari Perpres tersebut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menerbitkan Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024. Kedua kebijakan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menjalankan program percepatan penurunan stunting di daerahnya. Provinsi Jawa Timur telah menerbitkan SK Gubernur Jawa Timur Nomor 68 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021-2024 serta Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/977/Kpts/013/2022 Tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2022-2024.

Kedua kebijakan ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di wilayah Provinsi Jawa Timur. Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi, Pemerintah Provinsi berpedoman pada pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Pelaksanaan 5 (lima) pilar tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, dan penanggung jawab.

TPPS yang dibentuk berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/977/Kpts/03/2022 ini mengatur tugas TPPS sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan, mensinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* antar organisasi perangkat daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat provinsi;

- b. Menyelenggarakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia bagi organisasi perangkat daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- c. mendiseminasikan kebijakan dan informasi terkait percepatan penurunan *Stunting* ke kabupaten/kota yang ada di provinsi;
- d. menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat Provinsi;
- e. mengkoordinasikan pemanfaatan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting bersama secara lintas sektor di tingkat provinsi dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pengarah Provinsi dan Tim Percepatan Penurunan Stunting Pusat;
- f. mengkoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat provinsi;
- g. memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pencegahan *Stunting* di tingkat provinsi;
- h. membentuk sekretariat sesuai kebutuhan; dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.

Adapun struktur dan anggota TPPS sebagai berikut:

No	Jabatan Dalam Tim	Keterangan jabatan/ instansi
1	Pengarah	a. Gubernur Jawa Timur b. Wakil Gubernur Jawa Timur
2	a. Ketua b. Wakil Ketua I c. Wakil Ketua II d. Wakil Ketua III	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
3	a. Sekretaris b. Wakil Sekretaris	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur
4	Bidang Bidang: a. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif	

	<p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur</p> <p>a) Kepala Bidang Kemasyarakatan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur</p> <p>b) Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur</p> <p>c) Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur</p> <p>d) Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur</p> <p>e) Kepala Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur</p> <p>f) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur</p> <p>g) Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur</p> <p>h) Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur</p> <p>i) Kepala Bidang Urusan Agama Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur</p> <p>j) Wakil dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jawa Timur</p> <p>k) Kepala Sub-Koordinator Sub-Substansi Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur</p> <p>l) Wakil dari Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Jawa Timur</p> <p>m) Wakil dari Biro Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur</p> <p>n) Wakil dari <i>United Nations International Children's Emergency Fund</i> (UNICEF) Wilayah Jawa Timur</p>
	<p>b. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga</p>	

	<p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p>	<p>Koordinator Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Timur</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kepala Bidang Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur b) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur c) Kepala Bidang Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur d) Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur e) Kepala Bidang Publikasi dan Informasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur f) Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Timur g) Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Jawa Timur h) Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) i) Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Jawa Timur j) Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) k) Ketua Ikatan Da'i Indonesia Jawa Timur 1) Ketua Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) l) Pimpinan Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Jawa Timur m) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur n) Ketua Forum Pendidikan Anak Usia Dini Jawa Timur o) Ketua DPW Muslimat Nahdatul Ulama Jawa Timur p) Ketua DPW Fatayat NU Jawa Timur q) Ketua DPW Aisyiah Muhammadiyah Jawa Timur r) Ketua Nasyiatul Aisyiah Jawa Timur s) Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur t) Ketua <i>United Nations Children's Fund</i> (UNICEF) u) Ketua <i>Global Alliance for Improved</i>
--	---	---

		<p><i>Nutrition (GAIN)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> v) Ketua <i>Indonesian Urban Water, Sanitation Hygiene (IUWASH)</i> USAID w) Sub-Koordinator Sub-Subtansi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur x) Wakil dari Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Jawa Timur y) Wakil dari Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Jawa Timur
	<p>c. Bidang Koordinasi dan Konvergensi</p> <p>1) Kordinator</p> <p>2) Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Wakil dari Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan I Madiun b) Wakil dari Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan II Bojonegoro c) Wakil dari Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Malang d) Wakil dari Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan IV Pamekasan e) Wakil dari Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan V Jember f) Sekretaris Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana perwakilan Jawa Timur g) Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur h) Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur i) Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur j) Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi

		<p>Sosial, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur</p> <p>k) Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur</p> <p>l) Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur</p> <p>m) Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur</p> <p>n) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur</p> <p>o) Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur</p> <p>p) Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur</p> <p>q) Sub-Koordinator Sub-Substansi Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur</p> <p>r) Wakil dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur</p> <p>s) Wakil dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur</p> <p>t) Wakil dari Tim Tenaga Ahli <i>Local Government Capacity Building for Acceleration of Stunting Reduction (LGCB-AISR) Stunting</i> Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri</p>
	<p>d. Bidang Data, Monitoring Evaluasi dan Knowledge Management</p> <p>1) Koordinator</p>	<p>Koordinator Bidang Advokasi dan Informasi Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur</p>

	2) Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a) Kepala Bidang Penerangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur b) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur c) Kepala Bidang Data dan Statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur d) Kepala Bidang Kemasyarakatan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur e) Sub-Koordinator Sub-Substansi Kesehatan Keluarga, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur f) Sub-Koordinator Sub-Substansi Pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur g) Sub-Koordinator Sub-Substansi Ketahanan Keluarga, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur h) Koordinator Konsorsium Perguruan Tinggi (Universitas Airlangga) i) Wakil dari Badan Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur j) Wakil dari Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Jawa Timur
--	------------	--

Sedangkan untuk Pemerintah Provinsi NTT, sebelum adanya Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 telah mempunyai kelompok kerja atau Pokja Percepatan pencegahan dan penanganan stunting yang dibuat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTT dan Surat Keputusan Kepala Bappelitbangda NTT tahun 2019 [2]. Kemudian untuk mengakomodir kebutuhan dan sesuai dengan perkembangan situasi maka dilakukan perubahan struktur kelompok kerja tersebut, dimana terdapat dua kelompok kerja terintegrasi untuk mencapai hasil yang maksimal. Untuk itu Pemerintah provinsi NTT juga bekerjasama dengan USAID untuk mendukung keberadaan tim koordinasi atau Pokja Percepatan Penurunan AKI AKB dan Pencegahan dan Penanganan Stunting NTT tersebut. USAID akan memberikan dukungan teknis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir, meningkatkan

sistem rujukan dan meningkatkan kualitas data untuk pengambilan keputusan di 22 Kabupaten kota se NTT.

Sebagaimana uraian dalam SK Gubernur, Tim Kelompok Kerja ini mempunyai tugas :

- a) Memfasilitasi Pembinaan, Pemantauan, Evaluasi dan tindak lanjut atas kebijakakan dan pelaksanaan program dan anggaran penyediaan intervensi pencegahan dan penanganan stunting prioritas di wilayah kabupaten/kota;
- b) Memfasilitasi dukungan teknis bagi peningkatan kapasitas kabupaten/kota dalam penyelenggaraan aksi konvergensi Pencegahan dan Penanganan Stunting; dan
- c) Mengkoordinasikan pelibatan institusi non pemerintah untuk mendukung konvergensi Pencegahan dan Penanganan Stunting.

Selain itu Gubernur NTT juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor BU.440/63/Dinas Kesehatan/I/2022 kepada para bupati walikota se-NTT tentang Pelaksanaan Operasi Timbang, membentuk Tim Operasi Timbang di tingkat kabupaten dengan melibatkan OPD terkait. Tim Operasi Timbang juga ada di tingkat Puskesmas dengan jumlah sebanyak 3 tim.

Menurut kepala Dinas Kesehatan provinsi NTT mengatakan :

Pemerintah provinsi memang bekerja keras untuk mencapai target pada RPJMPD 2023 di angka 12% ini memang berat tapi kita semua tetap berusaha sekeras mungkin salah satunya dengan memperkuat tim di lapangan ...Satu tim terdiri dari tiga orang yaitu Tenaga Gizi, Bidan dan Perawat atau Tenaga Kesehatan lainnya..." (wawancara, 29 Agustus 2023).

4.2. Analisis Peran Stakeholders dalam pencegahan stunting

Dalam rangka mempercepat penurunan stunting secara nasional, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendapatkan mandat menjadi koordinator melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Kebijakan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka stunting (**RAN PASTI**) 2022-2024 dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan diantaranya: 1) Pendekatan Keluarga Beresiko Stunting; 2) Pendekatan Multisektor dan Multipihak; 3) Pendekatan Intervensi Gizi Terpadu.

Dalam pelaksanaan 5 (lima) pilar sebagaimana dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 maka dibentuk Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota. Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi. Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi ini terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).

Dalam rangka memenuhi amanah Perpres 72 Tahun 2021, Provinsi Jawa Timur telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Provinsi Jawa. Gubernur bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Sedangkan yang bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi dilakukan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, yaitu BKKBN. Sedangkan Inspektorat Daerah bertanggung jawab melakukan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi.

Selain itu BKKBN juga sudah membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari tiga unsur. Unsur pertama adalah bidan atau tenaga kesehatan, yang kedua adalah kader PKK, dan yang ketiga adalah dari kader KB. Berikut wawancara dengan Kepala BKKBN Provinsi Jawa Timur terkait keberadaan Tim Pendamping Keluarga:

“Sejauh ini sudah ada 31.243 tim. Itu artinya kalau dikalikan tiga ya berarti ada 93.729 orang yang kita rekrut untuk mendampingi keluarga yang berisiko mengalami stunting. Jadi inilah usaha yang sedang kita lakukan untuk mempercepat penurunan stunting di Masyarakat” (Wawancara, 4 Juli 2023).

Dalam pencegahan dan penanganan stunting tidak semata menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan juga memerlukan peranserta aktif dari pihak non pemerintah yaitu pihak swasta, donor dan Masyarakat baik secara individu maupun komunitas. Di Tingkat Pusat terdapat 23 Kementerian dan Lembaga yang terlibat secara langsung dan berkolaborasi untuk percepatan pencegahan stunting sebagaimana

gambar 2. Penyelenggara percepatan penurunan stunting mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota serta pemerintah desa. Adapun program dan kegiatan yang dijalankan meliputi:

1. Penguatan perencanaan dan Penganggaran
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan
3. Peningkatan Kualitas Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan; serta
4. Peningkatan sumber daya manusia.

Banyak sekali pihak yang diberikan kewenangan dalam penanganan stunting ini mulai dari Wakil Presiden, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Agama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Sekretaris Negara, Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan seterusnya. Demikian pula di level pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota hingga pemerintah desa. Hal ini tentu memerlukan mekanisme koordinasi yang tidak mudah. Dalam rangka mencapai target 14% pada Tahun 2024, koordinasi yang efektif dan efisien sangat diperlukan, terutama pada sebuah tim yang besar. Pembahasan yang bersifat terus-menerus yang tak kunjung usai perlu dihindari, agar implementasi dapat segera dilakukan.



Gambar 2. Stakeholder pencegahan dan penanganan stunting.
Sumber: tnp2k.go.id, 2023. [3]

Meskipun begitu banyak pihak yang bertanggung jawab dalam percepatan penanganan dan penurunan stunting, namun masih terdapat kendala-kendala yang justru timbul dari lemahnya Kerjasama diantara jajaran instansi pemerintah baik koordinasi secara vertikal maupun horizontal. Sebagaimana disampaikan Kepala BKKN pada Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan The Habibie Center (THC) sebagai berikut:

“Saat ini Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pencegahan Stunting telah disusun dan dikoordinasikan secara komprehensif, di antaranya dituangkan dalam delapan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting. Namun tantangan terbesar dalam mencegah dan menurunkan angka stunting tersebut ada pada implementasi dari strategi dan aksi konvergensi itu” [4].

Analisis peran stakeholder sangat penting dalam meningkatkan penanganan stunting. Dengan menganalisis peran stakeholder, kita dapat memahami kontribusi masing-masing pihak dalam upaya penanggulangan dan penanganan stunting, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta merancang strategi yang lebih efektif.

Menurut Nugroho,dkk (2014), peran stakeholder dapat diklasifikasikan menjadi 5 kategori, yaitu: peran sebagai Policy Creator, Koordinator, Fasilitator, Implementor, dan Akselerator [5]. Sementara itu menurut Aden dan Ackermann sebagaimana dikutip dalam Setiawan et al. (2020: 7-8), pemetaan stakeholder dapat dilakukan menggunakan teknik "power versus interest grid" yang mengkategorikan stakeholder ke dalam empat jenis berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh mereka terhadap program atau kebijakan yaitu subject, key players, context setter, dan crowd [6].

Berikut adalah analisis peran stakeholder berdasarkan Perpres nomor 72 tahun 2021 telah ditetapkan peran pemerintah daerah dalam percepatan penurunan stunting. Peran pemerintah provinsi selaku **Policy Creator, Koordinator, Fasilitator**, maupun **akselerator** meliputi:

1. Menyiapkan kebijakan berkaitan dengan penurunan stunting;
2. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara Maksimal;
3. Membentuk atau memanfaatkan tim koordinasi yang sudah ada untuk penurunan stunting Kampanye dan promosi penurunan stunting dengan pendekatan behavior change communication (BCC);
4. Mengalokasikan anggaran APBD Provinsi dan sumber dana lainnya yang sah untuk program dan kegiatan penurunan stunting kab/kota;

5. Penguatan kapasitas sumberdaya provinsi dan kabupaten/kota;
6. Review pembelajaran para pihak, pembelajaran antar kabupaten/kota;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi upaya penurunan stunting yaitu memonitoring pelaksanaan 8 Aksi penurunan stunting terintegrasi di kab/kota;
8. Penilaian kinerja kab/kota dalam pencapaian aksi konvergensi pencegahan stunting;
9. Menyiapkan sistem reward terhadap pencapaian kinerja kabupaten/kota dalam penurunan stunting

Adapun peran pemerintah kabupaten/kota **Policy Creator, Koordinator, Fasilitator, maupun akselerator** meliputi:

1. Menyiapkan kebijakan berkaitan dengan penurunan stunting
2. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal secara Maksimal
3. Menetapkan target percepatan penurunan stunting untuk mendukung pencapaian target nasional
4. Menetapkan program dan kegiatan terkait penurunan stunting, dalam dokumen perencanaan dan penganggaran
5. Meningkatkan alokasi dan efektifitas penggunaan dana desa untuk penurunan stunting
6. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penurunan stunting
7. Untuk Penurunan Stunting Pemda melaksanakan 8 aksi konvergensi
8. Melibatkan peran multisektor termasuk non pemerintah dalam upaya penurunan stunting

Sementara itu peran pemerintah desa dalam percepatan penurunan stunting juga tidak kalah besarnya sebagai **Koordinator, Fasilitator, Implementor** maupun **akselerator** yaitu meliputi (KemendesPDTT,2021):

1. Optimalisasi peran Kader Pembangunan Manusia (KPM) di desa untuk identifikasi cakupan 5 paket layanan pencegahan stunting bagi sasaran rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), meliputi:
 - a. layanan kesehatan ibu dan anak (KIA),
 - b. layanan konseling gizi terpadu,
 - c. layanan air bersih dan sanitasi,
 - d. layanan jaminan sosial (Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Akta lahir, BPJS bersubsidi, dll),
 - e. layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) termasuk kelas parenting;
2. Fasilitasi perencanaan pembangunan desa untuk pencegahan stunting melalui pendekatan partisipasi masyarakat:

- a. Penyediaan tenaga Kader Pembangunan Manusia (KPM) di Desa;
- b. Penyediaan data rumah tangga 1.000 hari pertama kehidupan (1000 HPK) by name by address;
- c. Penyelenggaraan rembuk stunting di Desa; dan d. Pengembangan Rumah Desa Sehat (RDS) sebagai community center;
3. Mengkoordinasikan implementasi layanan konvergensi pencegahan stunting di desa;
4. Monitoring laporan konvergensi pencegahan stunting di desa pada sasaran rumah tangga 1.000 HPK:
 - a. Mengembangkan aplikasi eHDW berbasis android,
 - b. Mengoperasikan dashboard eHDW kabupaten.

Dengan banyaknya pihak yang bertanggungjawab dalam program penanganan stunting, begitu pula dengan sumber pembiayaan yang dialokasikan untuk program tersebut. Dana yang bersumber dari APBN, dalam bentuk belanja pemerintah pusat mulai dari kementerian/lembaga maupun dari anggaran non-Kementerian/lembaga, hingga dalam bentuk transfer ke daerah dan dana desa yang masuk ke dalam APBD. Untuk lebih lengkapnya, sumber pembiayaan pemerintah untuk pencegahan stunting sebagaimana dijelaskan pada gambar 3 di bawah ini :



Gambar 3. Sumber Pembiayaan pencegahan stunting
 Sumber: kemenkeu.go.id. [7]

4.3. Prevalensi Stunting di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur

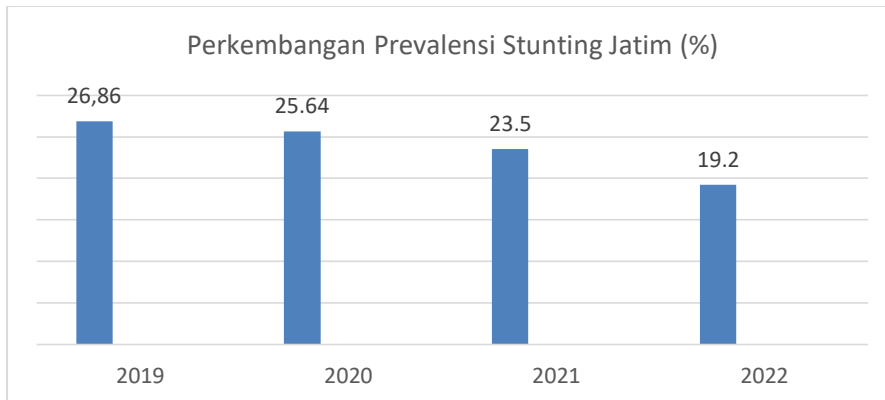
Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan menunjukkan, prevalensi balita stunting di Jawa Timur mencapai 19,2% pada 2022. Provinsi ini menduduki peringkat ke-25 dengan prevalensi balita *stunting* tertinggi di Indonesia tahun lalu. Jawa Timur berhasil memangkas angka balita *stunting* sebesar 4,3 poin dari tahun sebelumnya. Pada 2021, tercatat prevalensi balita *stunting* di provinsi ini sebesar 23,5%. Berikut sebaran prevalensi stunting di Kabupaten Kota di Jawa Timur.

Tabel 1. Rincian Angka Balita Stunting di Wilayah Jawa Timur pada 2022

No	Kab/Kota	%	No	Kab/Kota	%
1	Kabupaten Jember	34,9	20	Kabupaten Trenggalek:	19,5
2	Kabupaten Bondowoso	32	21	Kabupaten Banyuwangi :	18,1
3	Kabupaten Situbondo	30,9	22	Kota Malang: 18%	18
4	Kabupaten Ngawi	28,5	23	Kabupaten Madiun: 17,6%	17,6
5	Kabupaten Lamongan	27,5	24	Kabupaten Tulungagung:	17,3
6	Kabupaten Bangkalan	26,2	25	Kabupaten Probolinggo:	17,3
7	Kota Batu	25,2	26	Kabupaten Sidoarjo:	16,1
8	Kabupaten Tuban	24,9	27	Kabupaten Magetan:	14,9
9	Kabupaten Bojonegoro	24,3	28	Kabupaten Blitar: 14,3%	14,3
10	Kabupaten Lumajang	23,8	29	Kota Kediri: 14,3%	14,3
11	Kota Probolinggo	23,3	30	Kabupaten Ponorogo:	14,3
12	Kabupaten Malang - Kepanjen	23	31	Kota Blitar: 12,8%	12,8
13	Kabupaten Jombang	22,1	32	Kabupaten Mojokerto:	11,6
14	Kabupaten Kediri	21,6	33	Kabupaten Gresik: 10,7%	10,7
15	Kabupaten Sumenep	21,6	34	Kota Madiun: 9,7%	9,7
16	Kota Pasuruan	21,1	35	Kota Mojokerto: 8,4%	8,4
17	Kabupaten Pacitan	20,6	36	Kabupaten Pamekasan:	8,1
18	Kabupaten Pasuruan	20,5	37	Kabupaten Sampang: 6,9%	6,9
19	Kabupaten Nganjuk	20	38	Kota Surabaya: 4,8%	4,8

Sumber: databoks.katadata.co.id, Februari 2023[8]

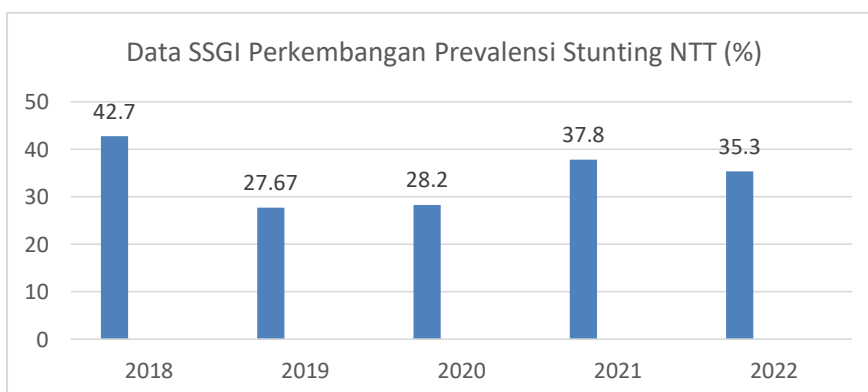
Berikut perkembangan prevalensi stunting di Jawa Timur dari tahun ke tahun



Grafik 1. Perkembangan prevalensi stunting Jatim.

Sumber: kominfo.jatimprov.go.id, 2022 [9]

Jika provinsi Jawa Timur menunjukkan kecenderungan penurunan stunting secara gradual atau bertahap sedikit demi sedikit, fenomena ini berbeda dengan yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dimana penurunan prevalensi stunting sangat pesat. Bahkan sejak tahun 2020 lebih rendah dari pada Jawa Timur.



Grafik 2. Perkembangan prevalensi stunting NTT

Sumber: Dinas Kesehatan NTT, 2022. [10]

Meskipun prevalensi stunting tercatat telah banyak mengalami penurunan, namun perlu diwaspadai apakah angka tersebut mencerminkan kondisi yang

sesungguhnya. Berikut hasil wawancara dengan salah seorang informan dari BKKBN Provinsi NTT:

“ memang benar saat ini prevalensi stunting di NTT sudah turun menjadi 15, % tapi kita juga tidak tau pastinya apakah karena sudah banyak yang lulus stunting ...artinya usianya sudah di atas lima tahun jadi tidak lagi dipantau karena stunting kan yang dipantau dari usia 0 sampai 5 tahun saja “ (wawancara tanggal 30 Agustus 2023).

Sedangkan di Jawa Timur penurunan angka prevalensi stunting lebih disambut dengan optimis sebagaimana pendapat salah seorang informan dari unsur BKKBN sebagai berikut:

“ memang betul kita tetap harus waspada untuk Jawa Timur masih ada beberapa kabupaten yang tinggi, namun dengan komitmen semua lapisan mulai pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga desa sekarang ini semua fokusnya ke pencegahan dan penurunan stunting dengan intervensi spesifik dan sensitive semua dilakukaninsyaallah kita tetap optimis bu”. (wawancara tanggal 8 September 2023).

4.4. Masalah/kendala dalam pencegahan dan penanganan stunting

Stunting merupakan pertanda bahwa ada masalah dalam manajemen penyelenggaraan pelayanan dasar. Stunting dapat terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun, dan bila tidak diimbangi dengan catch-up growth (tumbuh kejar) mengakibatkan menurunnya pertumbuhan, masalah stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan meningkatnya risiko kesakitan, kematian dan hambatan pada pertumbuhan baik motorik maupun mental [11]. Hal ini khususnya terkait dengan belum optimalnya skala, kualitas, dan keterjangkauan pelayanan pada kelompok sasaran prioritas, yaitu Remaja, Calon Pengantin, Ibu Menyusui, Ibu Hamil, dan Anak usia 0 – 59 Bulan.

Bukti yang konsisten menunjukkan pemberian ASI non-eksklusif selama 6 bulan pertama, status sosial ekonomi rumah tangga yang rendah, kelahiran prematur, panjang lahir pendek, dan tinggi badan serta pendidikan ibu yang rendah merupakan determinan stunting anak yang penting di Indonesia [12]. Selanjutnya hasil kajian review sejumlah artikel penelitian menemukan bahwa pola asuh, imunisasi dasar,

sanitasi dan higiene dasar, penyakit diare, kebiasaan merokok, dan infeksi saluran pernapasan atas merupakan faktor risiko stunting [13].

Permasalahan Stunting di Indonesia diperlukan penanganan multisektor. Ada 6 faktor yang mempengaruhi masih tingginya prevalensi stunting, yaitu antara lain: 1) praktik pengasuhan yang tidak baik, 2) terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC-Ante, Natal care, Post Natal dan pembelajaran dini yang berkualitas, 3) kurangnya akses ke makanan bergizi, 4) kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi, 5) masih beragamnya data stunting, dan 6) terbatasnya persepsi serta perilaku masyarakat terhadap stunting.

Selain 6 faktor di atas, belum efektifnya program-program pencegahan stunting juga diduga karena: 1) belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif di semua tingkatan- terkait dengan perencanaan dan penganggaran, penyelenggaraan, dan pemantauan dan evaluasi; 2) belum efektif dan efisiennya pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya dan sumber dana; 3) keterbatasan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan program; 4) Masih minimnya advokasi, kampanye, dan diseminasi terkait stunting, dan berbagai upaya pencegahannya (<https://www.tnp2k.go.id/>).

Pencegahan dan penanganan Stunting di daerah juga terkendala oleh data yang tidak akurat. Sebagaimana temuan KOPMAS [14] di Kecamatan Stabat, Langkat, Sumatera Utara, dimana hampir 70 % anak mengalami gizi buruk yang mengarah ke stunting. Namun data Kepala Dinas Kesehatan Langkat, melaporkan daerahnya tidak ada kasus stunting atau *zero stunting*. Temuan lainnya di Depok yang menyerahkan pendataan tinggi badan dan berat badan anak kepada orang tua tanpa melibatkan kader kesehatan. Data yang diperoleh tidak akurat sehingga tidak ada penanganan yang tepat dan berkelanjutan. Kecenderungan pejabat daerah memanipulasi data dikarenakan adanya target Pemerintah Pusat untuk menurunkan tingkat prevalensi stunting pada tahun 2024 menjadi 14%. Data yang tidak akurat ini sangat berbahaya karena justru akan memperparah kondisi anak yang seharusnya mendapat perhatian khusus menjadi kehilangan haknya dan kasus stunting dalam jangka panjang justru akan meningkat.

Dengan dibentuknya TPPS mulai di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten / kota diharapkan kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat segera diatasi dengan efektif.

Namun sejauh ini masih terdapat kendala, sebagaimana ungkapan Kepala BKKBN Jawa Timur sebagai berikut:

“Kita perlu memperbaiki komunikasi kita kembali dan masing-masing anggota dari TPPS memiliki pemahaman dan komitmen siapa berbuat apa. Jujur saja masalah koordinasi dan komunikasi antar sektor ini masih perlu lebih ditingkatkan lagi” (wawancara, 21 Agustus 2023).

Kendala komunikasi dan kolaborasi yang masih perlu ditingkatkan juga disampaikan oleh informan dari BKKBN Provinsi NTT sebagai berikut:

“ TPPS ini kan terdiri dari beberapa skpd ...memang salah satu kendalanya masih ada ego sektor masing-masing skpd jadi perlu ditingkatkan komunikasinya karena TPPS disini masih baru ya jadi belum begitu efektif program-programnya” (wawancara, 29 Agustus 2023).

Dari kedua pernyataan informan tersebut menunjukkan bahwa TPPS yang dibentuk di kedua provinsi tersebut masih perlu penataan yang lebih baik terkait pembagian tugas dan kewenangan yang jelas serta mekanisme koordinasi yang lebih efektif sehingga tujuan TPPS untuk mempercepat penurunan stunting secara riil benar-benar dapat tercapai.

4.5. Perlunya Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi dalam pencegahan dan penanganan stunting

Perlunya penanganan stunting secara terintegrasi menjadi strategi utama yang harus dilakukan karena terjadinya stunting bukan hanya disebabkan oleh satu aspek Kesehatan saja melainkan merupakan akibat dari berbagai aspek seperti pendidikan, sosial ekonomi, bahkan budaya. Oleh karena itu untuk mencegah dan menanganinya juga memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi [15] (Nurhaeni et al., 2021) melalui *collaborative government* [16] (Purnamasari & Priyanti, 2021). Pemerintah sebagai aktor kunci kolaborasi harus mengembangkan ide dan gagasan yang mendorong para pihak untuk melakukan aksi strategis. Tidak hanya itu, dukungan sumber daya dan keterbukaan publik diperlukan untuk menciptakan kepercayaan dari semua stakeholder [17] (Saufi et al., 2021).

Untuk mengurangi angka prevalensi stunting yang tinggi di Nusa Tenggara Timur juga telah dirumuskan strategi sebagaimana disampaikan Sekda Provinsi NTT Kosmas D. Lana sebagai berikut:

“Strategi yang diambil untuk rencana aksi daerah penanggulangan Stunting di NTT adalah, dengan mendorong dan memperkuat usaha konvergensi intervensi terhadap penyebab langsung atau dengan intervensi gizi spesifik. Grand Strategy Rencana aksi daerah melalui: Penanganan dan pencegahan stunting bagi balita pendek, Penguatan kerjasama lintas sektor, sektor swasta, dunia usaha, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan penanganan stunting” (Wawancara, 28 Agustus 2023).

Strategi tersebut diambil sesuai dengan pengarahannya langsung Presiden dan Wakil Presiden, dimana pemerintah mencanangkan program percepatan penanggulangan stunting melalui Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting (Stranas Stunting) 2018-2024, yaitu sebuah strategi jangka panjang terintegrasi yang mengedepankan konvergensi upaya intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Penanganan stunting dilakukan dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan, dan pada tahun 2019 difokuskan di 160 kabupaten/kota prioritas [18].

Sementara itu menurut Wakil Gubernur NTT selaku Ketua TPPS Provinsi NTT menyampaikan beberapa strategi yang akan digunakan untuk mempercepat penanggulangan stunting yaitu: *Pertama*, dengan menggunakan dimensi ideal, artinya penurunan angka stunting wajib mencapai 10%. *Kedua*, dimensi realistis, apabila ada hambatan, tantangan dan gangguan, maka wajib didata secara rinci agar diketahui apa saja yang akan dihadapi di lapangan. *Ketiga*, teknik fleksibilitas, yaitu semua pihak yang terkait harus cepat tanggap dalam usaha menurunkan angka stunting, karena stunting tidak menjadi tanggung jawab satu pihak saja tetapi tanggung jawab semua pihak [19].

Dari kedua pernyataan baik dari Sekretaris Daerah maupun Wakil Gubernur NTT menekankan perlunya kerjasama, sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam pencegahan dan penanganan stunting. Untuk itu diperlukan sistem informasi agar program kegiatan yang dilakukan di masing-masing instansi dapat terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik dan efektif. Sejauh ini TPPS Provinsi NTT belum memiliki sistem informasi untuk memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar sektor terkait.

Demikian pula di Jawa Timur, beberapa strategi percepatan penurunan stunting telah dilakukan sebagaimana disampaikan Kepala BKKK sebagai berikut:

“Beberapa hal kunci dalam menurunkan stunting yaitu mengoptimalkan sistem monev terpadu, komitmen Gubernur serta Bupati/Walikota terkait penurunan stunting, mendapatkan data akurat dengan sasaran yang jelas, pemberdayaan masyarakat melalui dana desa, memberikan sistem insentif bagi daerah dengan kinerja terbaik, peningkatan peran aktor non pemerintah serta adanya riset dan inovasi daerah” (Wawancara, 4 Juli 2023).

Dalam upaya percepatan pencegahan stunting, Setwapres memperoleh mandat untuk memastikan pencapaian tujuan dari Pilar 5 yaitu membangun sistem pemantauan dan evaluasi terpadu dari semua program prioritas yang terdiri dari intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Sebagai realisasinya, maka TP2AK di Setwapres bertugas mengkompilasi semua data program dari KL terkait untuk kemudian diolah dan ditampilkan dalam dashboard pemantauan terpadu. Dashboard yang dikembangkan oleh Setwapres berfungsi sebagai alat pantau dan evaluasi perkembangan program bagi para pemangku kepentingan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan bahkan desa. Diharapkan dengan adanya Dashboard pemantauan dan evaluasi terpadu ini dapat mendukung penentuan kebijakan yang berbasis data pada semua tingkat administratif.



Gambar 4: Beranda stunting.go.id

Selain itu juga diperlukan sistem informasi terpadu yang dapat menjadi media bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan penanganan stunting berbasis data-data yang akurat. Sistem informasi manajemen sebagai sistem yang dibuat untuk melakukan pengolahan data oleh organisasi. Ini biasanya difungsikan sebagai alat bantu dalam meningkatkan efektivitas penerapan berbagai regulasi.

Sejauh ini yang banyak dikembangkan adalah aplikasi. Sebagaimana dilakukan pemerintah kabupaten Sumedang dengan menciptakan Aplikasi Simpati guna menyediakan data balita dan cakupan intervensi percepatan penurunan stunting yang cepat, dinamis dan akurat. Sehingga, pemerintah di tingkat Kabupaten, kecamatan dan desa dapat mengambil kebijakan yang tepat dan efektif dalam menangani wilayah-wilayah yang berpotensi terjadi stunting cukup tinggi. Aplikasi ini dapat digunakan oleh Kader Posyandu, Kader Pembangunan Manusia (KPM), pemerintah desa, puskesmas, kecamatan, dinas/badan/kantor, pimpinan daerah (bupati dan wakil bupati). Praktik baik intervensi pengembangan aplikasi Simpati dapat menjadi pembelajaran daerah lain dalam mendukung upaya penurunan stunting yang sinergis melalui *good data, good decision, good result*.

Aplikasi yang dikembangkan dalam rangka penanganan dan pencegahan stunting di Jawa Timur juga sudah dikembangkan antara lain oleh Polda Jawa Timur. Kepolisian juga ikut berperan untuk menekan prevalensi angka stunting. Salah satunya dengan membuat aplikasi Si Centing Jawi Wetan. Aplikasi ini digagas oleh Polda Jatim. Si Centing Jawi Wetan memiliki kepanjangan Sistem Informasi Cegah Stunting Jawa Timur, yaitu sebuah aplikasi terkait dengan permasalahan stunting.

Menurut Kabid Dokkes Polda Jatim:

"Aplikasi Si Centing Jawi Wetan merupakan aplikasi yang terintegrasi dan bersifat holistik dalam penanganan stunting dengan basic rumah sakit Bhayangkara, dalam aplikasi ini tersedia layanan informasi dan konsultasi bagi masyarakat. Khususnya yang mengalami stunting. Aplikasi ini mendigitalisasi proses-proses yang dilakukan di posyandu menjadi semudah proses-proses digital. Orang cukup menimbang dan memasukkan data habis itu tahu tabelnya dimana, kemudian hasilnya akan dibaca dan dievaluasi oleh dokter gizi dan dokter anak" (Wawancara, 9 Agustus 2023).

Namun aplikasi yang dikembangkan tersebut belum terintegrasi dengan aplikasi di jajaran instansi lain masih terbatas di lingkungan Polda Jatim dan Rumah sakit Bhayangkara.

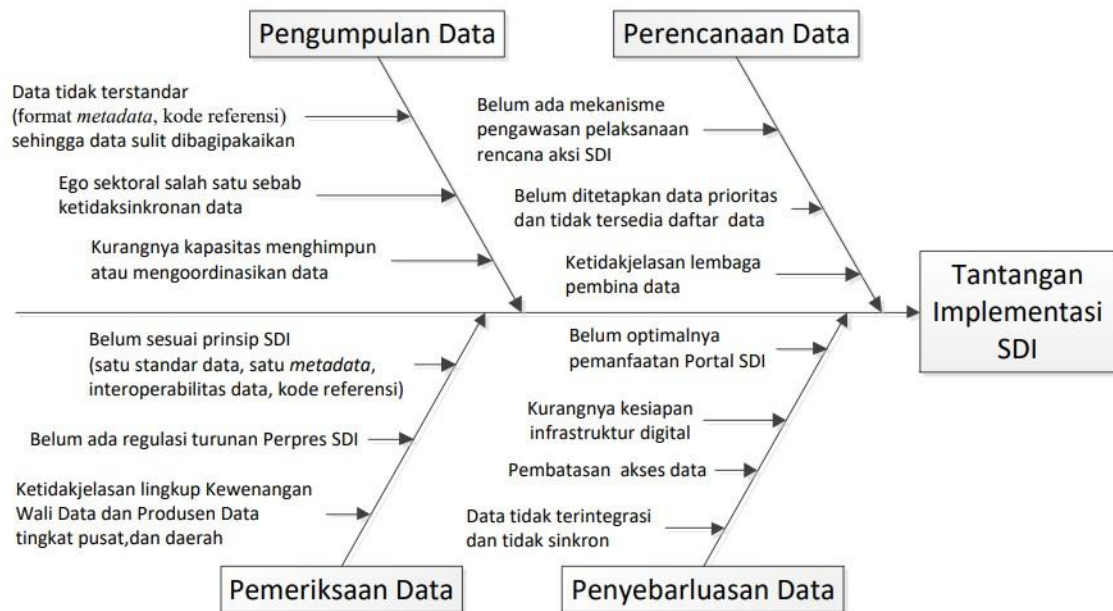
Aplikasi adalah subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan komputer untuk menjalankan tugas yang dimaksud oleh pengguna. Biasanya dikomparasi dengan software sistem dengan mengintegrasikan kemampuan computer. Sedangkan sistem informasi merupakan sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi. Sistem informasi menampung banyak aplikasi di dalamnya dan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi tersebut. Sedangkan **aplikasi adalah bagian dari sebuah sistem informasi**.

Dalam penanganan stunting yang melibatkan banyak sektor dan instansi tentu sangat memerlukan dukungan sistem informasi yang terintegrasi. Dengan adanya integrasi sistem tentu arus informasi akan semakin membaik dan memudahkan para pimpinan dalam mengambil keputusan maupun tindakan operasional yang relevan. Suatu pelaporan biasanya memang memerlukan waktu, namun demikian akan semakin banyak informasi yang relevan dalam kegiatan manajerial yang dapat diperoleh bila diperlukan. Keuntungan ini merupakan alasan yang kuat untuk mengutamakan perlunya dibangun sistem informasi terintegrasi karena tujuan utama dari sistem informasi adalah memberikan informasi yang benar pada saat yang tepat.

Integrasi sistem informasi dari sebuah sistem diperlukan karena : 1) Adanya kebutuhan konstituen untuk bekerja sama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam suatu pemerintahan. 2) Terjadinya pengolahan data antar sistem informasi tiap OPD yang saling terkait, sehingga untuk melengkapi suatu informasi dibutuhkan proses pertukaran data dengan sistem informasi yang lain. 3) Dapat memungkinkan penyediaan realtime pengaksesan data. 4) Mengubah data untuk analisis dan pertukaran data, mengatur penempatan data untuk kinerja. Sehingga integrasi system informasi antar OPD sudah menjadi suatu kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program-program termasuk dalam penanganan stunting. Konsep Integrasi sistem adalah yaitu suatu konsep sistem yang dapat saling berhubungan satu dengan yang lain dengan berbagai cara yang sesuai dengan keperluan. Hal ini sangat bermanfaat bila suatu data dalam file suatu sistem diperlukan juga oleh sistem yang lainnya atau output suatu sistem menjadi Input sistem lainnya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021-2024, Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi melalui Sistem manajemen data terpadu dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan juga mengacu pada hasil Riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

Namun sejauh ini sistem manajemen data terpadu melalui mekanisme Satu Data Indonesia (SID) juga belum berjalan efektif. Demikian pula dengan data prevalensi stunting. Pada gambar berikut adalah pemetaan kendala dan tantangan penerapan Satu Data Indonesia (SID).



Gambar 5: Identifikasi Tantangan Implementasi SDI dipetakan dari Perpres No.39 Tahun 2019

Sumber: Islami, 2021 [20]

Masalah data di Indonesia masih menjadi problema tersendiri dilihat dari keakuratannya. Selama ini data yang dimiliki kementerian/lembaga maupun di pemerintahan daerah banyak yang tidak akurat dan tumpang tindih. Dengan melihat trend penurunan prevalensi stunting yang drastis pada beberapa daerah yang sebelumnya tinggi hal ini tentu menimbulkan pertanyaan. Apakah pengukurannya menggunakan indikator yang berbeda, apakah target atau kelompok sasaran yang diamati tidak akurat, tentu ini semua perlu kehati-hatian dalam pengambilan kebijakan. Kekeliruan data akan berakibat pada kekeliruan pula dalam pengambilan kebijakan atau program yang tidak tepat sasaran. Jika kondisi riil kasus stunting masih tinggi sementara pelaporan datanya diturunkan maka masyarakat justru yang akan dirugikan karena tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya masih mereka terima.

Akurasi data pengukuran stunting sangat penting sebagai tolok ukur percepatan penurunan stunting. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi merupakan pilar kelima dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting. Saat ini ada tiga metode pengukuran stunting yang digunakan. Pada tahun

2022, ketiga alat ukur stunting yang digunakan selama ini diperkuat, baik metodenya maupun cakupan pengukurannya. Sehingga hasil pengukuran data-data stunting ini betul-betul akurat. **Ketiga metode pengukuran stunting itu adalah Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), Aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM) yang keduanya dari Kementerian Kesehatan, serta Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bekerja sama dengan BKKBN dan Badan Pusat Statistik (BPS).**

Perbaikan pelaksanaan SSGI 2022 meliputi penambahan jumlah blok sensus dan jumlah rumah tangga yang memiliki balita. Perbaikan itu berupa penambahan dua kali jumlah dibandingkan pelaksanaan SSGI tahun 2021. Pada SSGI 2022, jumlah blok sensus 34.500. Sedangkan pada SSGI 2021 menggunakan 15.000 blok sensus. Jumlah rumah tangga yang memiliki balita juga bertambah dua kali lipat pada SSGI 2022 menjadi 345.000 dari tahun 2021 yang sebanyak 150.000. Berdasarkan SSGI 2021, tingkat prevalensi stunting secara nasional adalah 24,4 persen. Jumlah ini masih di atas ambang batas Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang merekomendasikan prevalensi stunting di bawah 20 persen.

Sumber data selanjutnya adalah Aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM) hasil penimbangan di Posyandu. Kelemahan pada metode aplikasi e-PPGBM ini adalah adanya bias baik itu penyimpangan maupun perbedaan data. Oleh karena itu, agar lebih akurat hasil pengukuran e-PPGBM, maka bayi yang ditimbang di setiap Posyandu itu harus lebih dari 90 persen dari balita yang terdata. Aplikasi e-PPGBM yang digunakan di lapangan masih ditemui ketidakakuratan data yang disebabkan diantaranya perhitungan prevalensi dibagi berdasarkan bayi / balita yang terdaftar di daerah tertentu, bukan berdasar bayi / balita yang benar-benar hadir dalam penimbangan, serta pencatatan hanya dengan nama panggilan, sehingga sulit untuk dilakukan tracing, testing, dan treatment (Wasiat,S. 2022) [21].

Sumber data ketiga adalah Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dilakukan setiap 5 tahun sekali yaitu untuk memperoleh informasi kependudukan dan kesehatan masyarakat dengan estimasi sampai level provinsi. Persiapan SDKI 2022 sudah dilaksanakan pada 2021 oleh BKKBN bekerja sama dengan BPS. Adapun dokumen yang sudah dihasilkan pada tahap persiapan SDKI 2022, yakni empat

kuesioner dan 14 buku pedoman. Sampel SDKI 2022 direncanakan sebanyak 2.080 blok sensus. Sementara itu, kerangka sampel SDKI 2022 akan menggunakan Master Sampel Blok Sensus dari hasil Sensus Penduduk Long Form 2020 (SPLF 2020).

Ketiga metode di atas digunakan untuk Memperoleh data yang akurat sehingga penanganannya juga akan lebih efektif. Selain meningkatkan akurasi data, efektivitas pencegahan dan penanganan stunting juga dipengaruhi oleh tingkat koordinasi dan integrasi program-program dari berbagai sektor terkait. Sebagaimana pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengatakan masih ada tumpang tindih kewenangan dari 17 Kementerian dalam mengatasi stunting yang pada akhirnya malah tidak efektif. Padahal masalah stunting ini berdampak pada produktivitas angkatan kerja Indonesia kedepan [22].

Penanganan stunting memang membutuhkan keterlibatan dari banyak unsur. Selain organisasi pemerintah juga banyak organisasi non pemerintah yang juga terlibat aktif dalam penanganan stunting, namun masih berjalan sendiri-sendiri sehingga program-programnya kurang terkoordinasi dengan baik. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem informasi manajemen yang terintegrasi sehingga dapat mempermudah koordinasi dan kolaborasi diantara instansi tersebut termasuk dalam penganggaran.

Tumpang tindih dalam pengelolaan anggaran stunting akan lebih mudah untuk dihindari dengan adanya sistem informasi manajemen yang terintegrasi yang digunakan sebagai media sinkronisasi tidak hanya data namun juga sinkronisasi program dan anggaran. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan pentingnya pengelolaan anggaran yang diperuntukkan untuk program peningkatan gizi masyarakat secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Salah satunya pada program penurunan prevalensi stunting terdapat indikasi tumpang tindih perencanaan dan anggaran antara pemerintah pusat dan daerah. Sebagai program prioritas nasional, upaya percepatan penurunan prevalensi stunting terus digencarkan pemerintah. Salah satunya dalam pengalokasian dana. KPK juga mendapatkan informasi adanya laporan inspektorat pemerintah daerah terkait pengadaan pada program penurunan prevalensi stunting yang tidak memberikan manfaat optimal [23].

Tumpang tindih juga terjadi pada aspek pengadaan dimana ditemukan adanya indikasi pengadaan barang yang tidak dibutuhkan misalnya program makanan

tambahan (PMT) yang dalam pelaksanaannya diseragamkan di seluruh daerah tanpa adanya analisis kebutuhan obyek. Hal ini mengakibatkan pengadaan barang yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. KPK merekomendasikan adanya integrasi perencanaan dan penganggaran antara pusat dan pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya tumpang tindih alokasi anggaran. Selanjutnya pada aspek pengadaan, perlu adanya kajian efektivitas dari barang yang dihasilkan dan beban administrasi dengan mempertimbangkan kebutuhan objek sehingga dapat bermanfaat.

Selama ini berbagai pihak yang memiliki program penanggulangan stunting baik lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, maupun lembaga donor baru sama-sama bekerja mencegah stunting, tetapi belum bekerja sama secara sinergis dan konvergen. Artinya, setiap institusi berjalan masing-masing. Akibatnya, program yang dilaksanakan tidak berdampak besar pada penurunan stunting. Kondisi tersebut di atas tentu akan dapat diminimalisir apabila terdapat sistem informasi manajemen yang terintegrasi. Sebagaimana hasil penelitian Muhshiyt, Supriyati dan Tri siswati (2021) peran yang telah dijalankan dari stakeholder sesuai dengan Perbup No.72 Tahun 2019, masih ada permasalahannya yaitu kurangnya proses koordinasi dan komunikasi antar lintas OPD yang tidak berjalan dengan baik [24].

Evaluasi terhadap pencegahan dan penanganan stunting menunjukkan bahwa 80% kabupaten/kota pada 12 provinsi prioritas menghadapi masalah seperti komitmen, koordinasi, perencanaan, penganggaran, regulasi, pemantauan dan evaluasi, data, dan sumber daya manusia [25]. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi itu sendiri juga masih bermasalah, diantaranya karenanya belum adanya sistem pemantauan dan evaluasi yang khusus dibuat untuk memantau keefektifan program kegiatan dan keterkaitan lintas sektor. Sistem pantauan seharusnya dibangun secara terkoneksi, guna memudahkan pemantauan serta perlunya mekanisme feedback atau umpan balik dari hasil pemantauan dan evaluasi yang parsial tersebut. Mekanisme umpan balik ini sangat penting sebagai bahan masukan bagi perencanaan tahunan baik dari sisi penganggaran, sasaran, maupun kegiatannya. Untuk itu diperlukan sistem informasi yang berbasis kolaborasi yang terintegrasi.

4.6. Model Sistem Informasi Manajemen Terpadu Penanganan Stunting

Upaya meminimalisir hambatan dan tantangan berdasarkan temuan penelitian ini. Salah satu kelemahan dalam penanganan stunting adalah masih adanya kendala koordinasi dan program-program yang dilaksanakan untuk penanganan stunting belum konvergen. Untuk itu tujuan dari kajian ini adalah untuk merumuskan model kolaborasi penanganan stunting dengan mengadopsi model *collaborative integrated environment*.

Beberapa hasil penelitian terdahulu telah menganjurkan penanganan stunting dari aspek tata kelola akan lebih efektif dengan penerapan sistem informasi yang terintegrasi. Prasetyo, A. et.al.(2023) memberikan pilihan percepatan penanganan stunting melalui Integrasi Sistem Berbasis Tata Kelola Pelayanan di Kabupaten/Kota, mengingat capaian dalam tiga tahun terakhir belum maksimal dilakukan di setiap kabupaten/kota di lima provinsi di Kalimantan [26]. Pada aspek lainnya, Khasanah, N. N., et.al. (2022) juga menyimpulkan bahwa pengembangan sistem informasi pencatatan status gizi balita stunting dapat menjadi salah satu alternatif pencegahan dampak stunting melalui pendekatan multilevel dengan melibatkan kader kesehatan dan tenaga kesehatan yang bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat di lingkup Puskesmas [27]. Demikian pula Tri Anggraeni dan Handrianus Vianey Melin Wula, (2021) dalam penelitiannya di Kabupaten Timur Tengah Utara (TTU) menyimpulkan diperlukannya upaya pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menggantikan beberapa fungsi hierarki dan menjadi media komunikasi yang cepat bagi para pemimpin dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian. Pemanfaatan TIK dapat dimanfaatkan oleh seluruh aktor dalam birokrasi baik atasan maupun bawahan untuk saling mengendalikan kegiatan penanganan stunting di Kabupaten Timur Tengah Utara [28].

Penelitian ini lebih komprehensif dan memberi peningkatan dari hasil penelitian terdahulu sebagaimana dipaparkan di atas, dengan memformulasikan model *collaborative integrated environment* (CIE) atau lingkungan terpadu kolaboratif yang diadopsi dari sektor privat ini juga sangat penting untuk diterapkan di sektor pemerintahan. CIE mencakup penggunaan teknologi informasi dan system yang memungkinkan berbagai unit atau departemen bekerjasama secara efisien dan

terintegrasi. Ide dasar dari konsep tersebut sebenarnya ingin menciptakan lingkungan kerja yang terintegrasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis web [29]. Lingkungan kerja kolaboratif adalah lingkungan di mana semua orang bergerak ke arah yang sama, apa pun yang mereka kerjakan. Orang-orang merasa pekerjaan mereka memiliki nilai. Setiap orang memiliki alat yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan terbaik mereka, sehingga proyek akan berjalan dengan lancar, bahkan ketika memerlukan masukan dari banyak tim sekalipun. Dengan konsep CIE dalam penanganan stunting, TPPS dapat menjadi pusat kerja penting yang dapat berintegrasi dengan alur kerja komunikasi lainnya di dalam dan di luar organisasi. Dalam lingkungan kolaborasi terintegrasi ini, platform kolaborasi tim dapat berfungsi sebagai inti utama dengan integrasi komunikasi yang diterapkan ke alur kerja lainnya [30]. Jadi ide dasar mengapa mengadopsi model CIE ini karena dalam penanganan stunting melibatkan banyak organisasi yang semuanya memerlukan sarana untuk mengintegrasikan program kerja mereka sehingga tercipta konvergensi sebagaimana diharapkan.

Dengan mengadopsi konsep kerja CIE di sektor pemerintahan khususnya dalam penanganan stunting, dapat diperoleh berbagai kelebihan yang antara lain meliputi:

1. Mendorong kolaborasi yang lebih efisien diantara berbagai departemen atau instansi pemerintah, dimana informasi dapat dibagikan dengan mudah dan pekerjaan dapat dikoordinasikan dengan lebih mudah;
2. Mendorong terintegrasinya sistem-sistem dan aplikasi yang seringkali masih dibuat secara terpisah di masing-masing instansi atau bagian;
3. Mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan tersedianya data yang terintegrasi dan komprehensif dari berbagai sumber, maka keputusan yang diambil juga akan lebih tepat sasaran. Saat ini pemerintah juga sedang gencar membangun Satu Data Indonesia (SID);
4. Meningkatkan pelayanan publik. Dengan adanya akses yang lebih mudah dan cepat terhadap data-data stunting, maka pemerintah akan dapat merespon setiap kasus yang muncul dengan lebih cepat dan akurat pula;
5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumberdaya termasuk sumberdaya keuangan. Dengan CIE program-program dapat disinkronkan sehingga tidak terjadi overlapping.

Adopsi model CIE ini akan berjalan lebih efektif didukung dengan adanya sistem SID yang dikembangkan Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor

39/2019 tentang Satu Data Indonesia. SID ini sengaja dibangun mengingat selama ini seringkali terjadi perbedaan dan ketidak sinkronan data pemerintah dengan Badan Pusat Statistik, oleh karenanya data-data tersebut akan diintegrasikan ke dalam SID. Harapannya SID akan berperan sebagai koordinator dari berbagai produsen data hingga melakukan mediasi dalam penentuan data untuk pengambilan kebijakan pemerintah. Desain yang dikembangkan berbasis pada tugas pokok dan fungsi dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dan peran stakeholder dalam pencegahan dan penanganan stunting. OPD yang terkait penanganan stunting, meliputi:

- a. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), dimana tugas dan fungsinya adalah mengoordinasikan, mensinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* antar organisasi perangkat daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat provinsi.

- b. Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang melaksanakan fungsi pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dan stakeholder lain, meliputi:
 - Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur
 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur
 - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur
 - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur
 - Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
 - Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
 - Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
 - Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
 - Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jawa Timur
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur
 - Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Jawa Timur
 - Biro Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
 - ***United Nations International Children's Emergency Fund*** (UNICEF) Wilayah Jawa Timur

c. Organisasi Perangkat daerah (OPD) dan stakeholder yang melaksanakan fungsi Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga, meliputi:

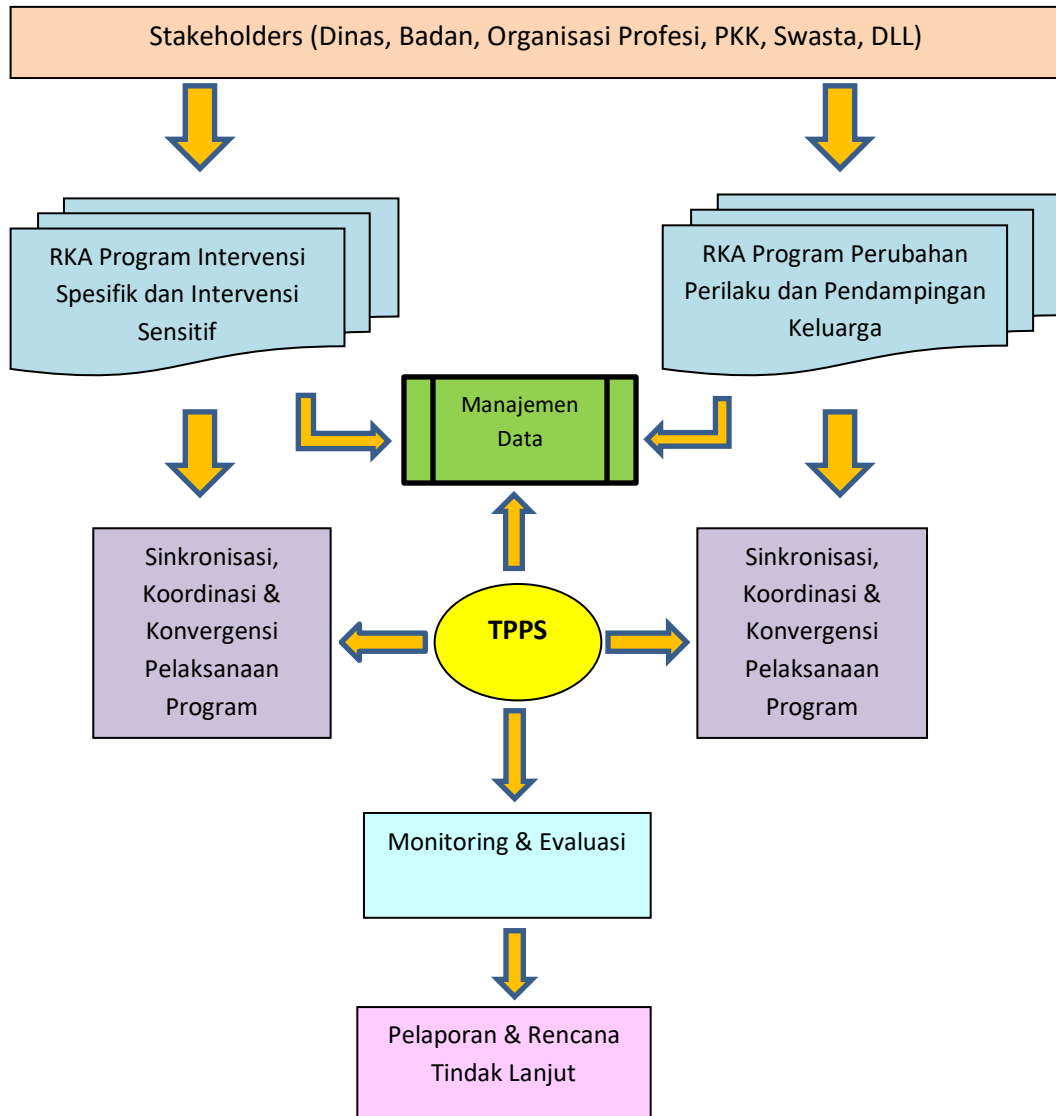
- Koordinator Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Timur
- Bidang Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
- Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur
- Bidang Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur
- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur
- Bidang Publikasi dan Informasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
- Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Timur
- Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Jawa Timur
- Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI)
- Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Jawa Timur
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)
- Ikatan Da'i Indonesia Jawa Timur 1) Ketua Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB)
- Nahdatul Ulama (PWNU) Jawa Timur
- Muhammadiyah Jawa Timur
- Forum Pendidikan Anak Usia Dini Jawa Timur
- DPW Muslimat Nahdatul Ulama Jawa Timur
- DPW Fatayat NU Jawa Timur
- DPW Aisyiah Muhammadiyah Jawa Timur
- Naswiatul Aisyiah Jawa Timur
- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur
- *United Nations Children's Fund (UNICEF)*
- *Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN)*
- *Indonesian Urban Water, Sanitation Hygiene (IUWASH) USAID*
- Dinas Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
- Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Jawa Timur
- Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Jawa Timur

d. Organisasi Perangkat daerah (OPD) dan stakeholder yang melaksanakan fungsi Koordinasi dan Konvergensi, meliputi:

- Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur
- Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan I Madiun
- Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan II Bojonegoro
- Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Malang
- Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan IV Pamekasan
- Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan V Jember
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana perwakilan Jawa Timur
- Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur
- Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur
- Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur
- Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
- Bidang Pengolahan dan Pemasaran, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
- Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur
- Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur
- Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur
- Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur
- Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur
- Sub-Koordinator Sub-Substansi Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur

- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur
 - Tim Tenaga Ahli *Local Government Capacity Building for Acceleration of Stunting Reduction (LGCB-AISR) Stunting* Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
- e. Organisasi Perangkat daerah (OPD) dan stakeholder yang melaksanakan fungsi manajemen data, monitoring evaluasi dan *Knowledge Management*, meliputi:
- Bidang Advokasi dan Informasi Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur
 - Bidang Penerangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur
 - Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur
 - Bidang Data dan Statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
 - Bidang Kemasyarakatan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur
 - Sub-Koordinator Sub-Substansi Kesehatan Keluarga, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
 - Sub-Koordinator Sub-Substansi Pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur
 - Sub-Koordinator Sub-Substansi Ketahanan Keluarga, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur
 - Koordinator Konsorsium Perguruan Tinggi (Universitas Airlangga)
 - Badan Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur
 - Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan pemetaan peran stakeholder dalam TPPS, dapat dirumuskan model Sistem Informasi Manajemen Terpadu Penanganan Stunting yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja TPPS, sebagai berikut:



Gambar 5: Model Collaborated Integrative Environment dalam Penanganan Stunting

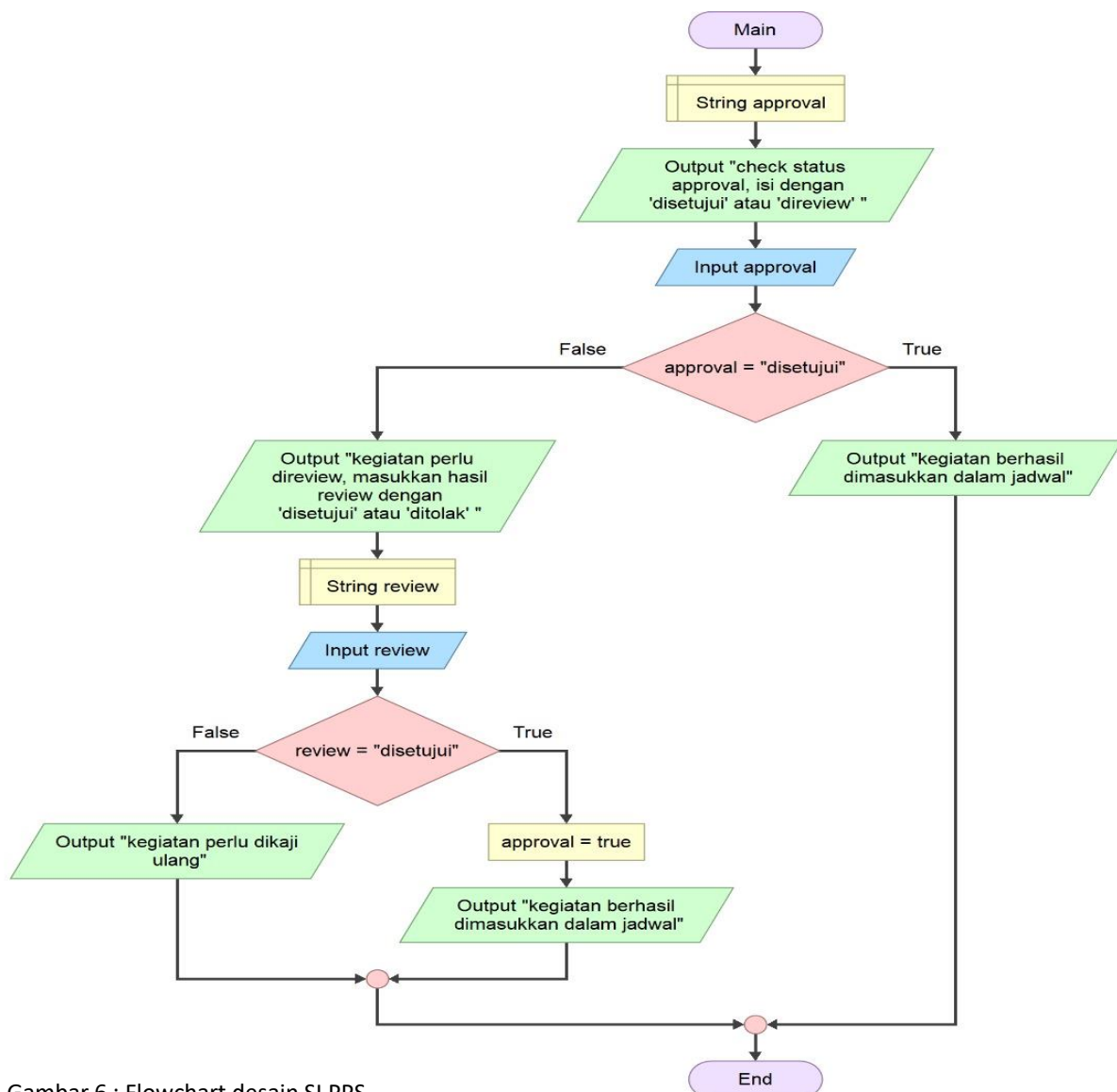
Setelah perumusan model sistem informasi manajemen terpadu penanganan stunting, maka dilakukan pembuatan desain program atau desain sistem. Desain sistem atau desain program merupakan tahap persiapan rancang bangun implementasi yang menggambarkan bagaimana sistem dibentuk. Tahap desain sistem mempunyai dua tujuan utama, yakni:

1. Untuk memenuhi kebutuhan para pemakai sistem berdasarkan analisis permasalahan yang telah dilakukan sebelumnya;

- Untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang komprehensif kepada programmer yang terlibat sehingga dalam pembuatan program komputernya menjadi tepat guna.

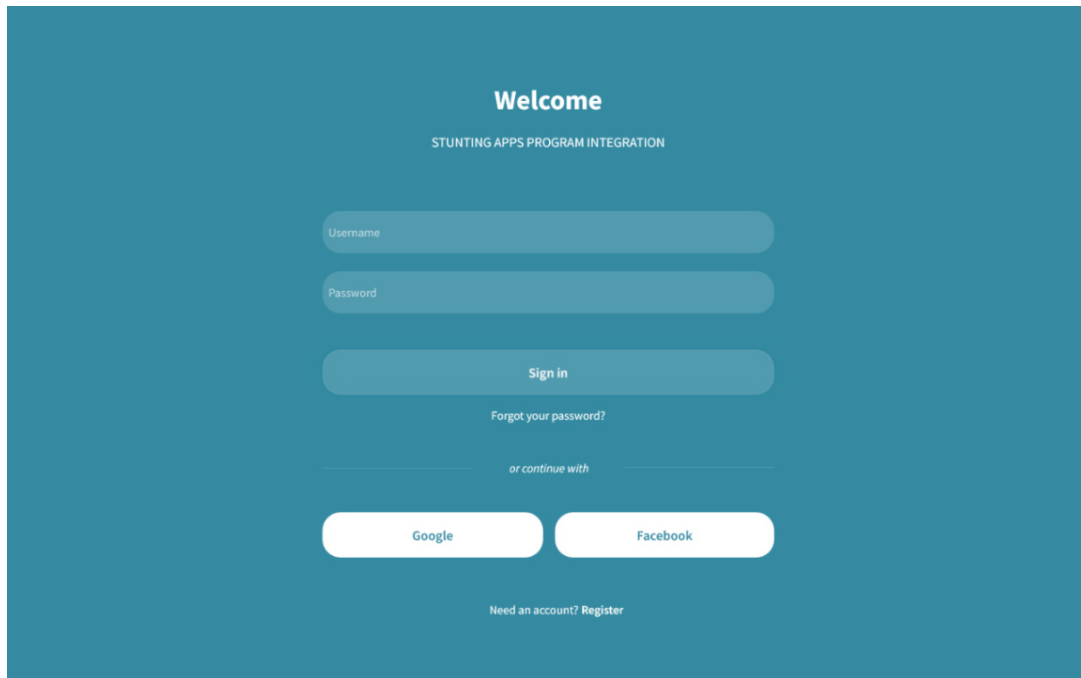
Dalam pembuatan sistem informasi Percepatan Penanganan Stunting yang terintegrasi, pada tahap berikutnya akan dibuat beberapa desain yang terdiri dari: flowchart, desain dashboard, pembuatan . Tujuan pembuatan form-form ini adalah sebagai sarana memasukkan data dan informasi yang nantinya diperlukan dalam penyusunan rencana kerja TPPS.

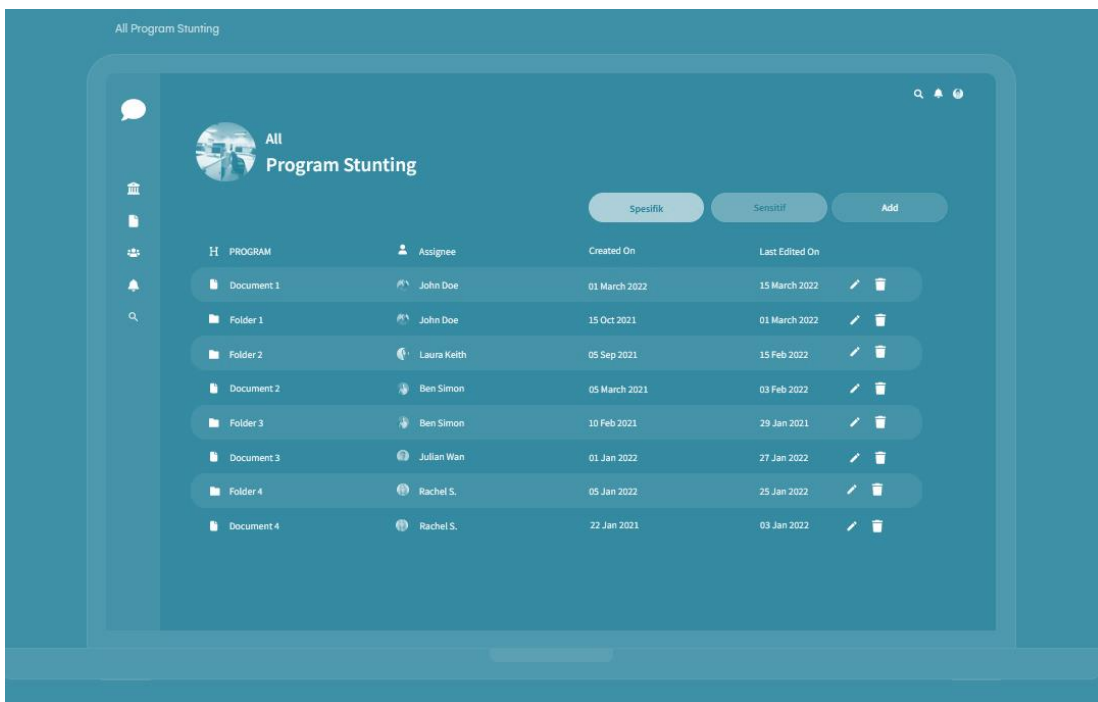
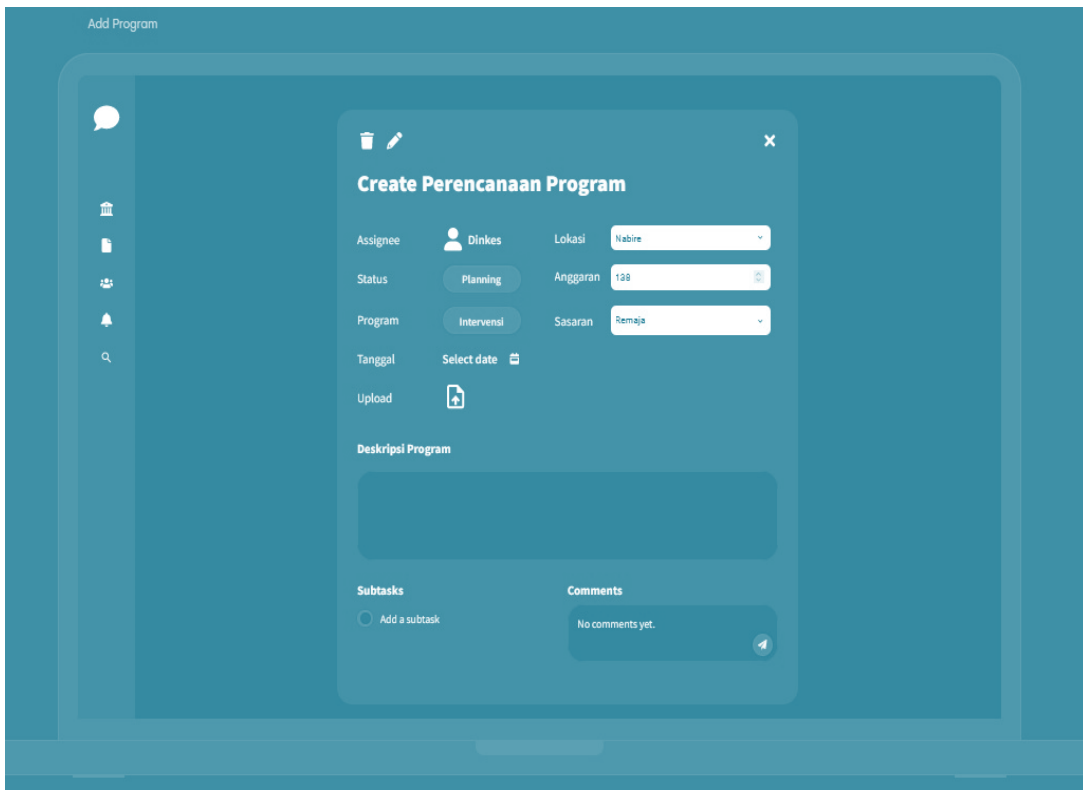
Berikut adalah flowchart desain Sistem Informasi Percepatan Penanganan Stunting (SI PPS):

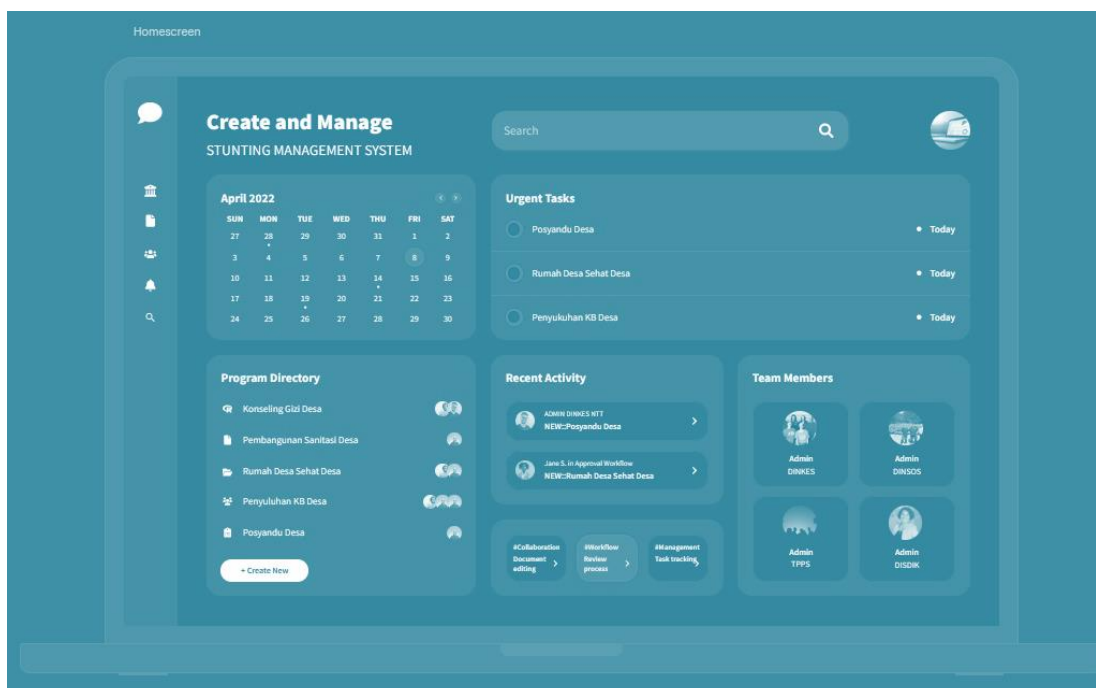
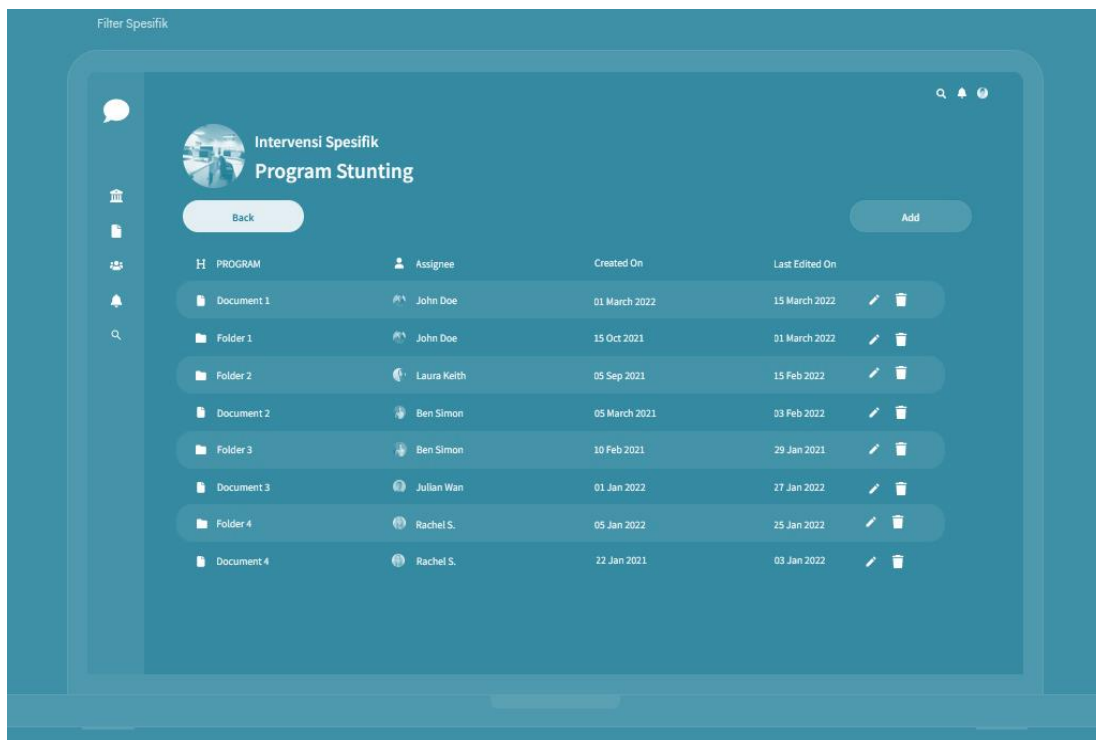


Gambar 6 : Flowchart desain SI PPS

Selanjutnya dirancang desain dashboard yang didalamnya mengakomodasi berbagai data dan dokumen yang diperlukan dalam rangka sinkronisasi program percepatan penanganan stunting yang meliputi form SKPD, form User, form Master, form data stunting, form rencana program kegiatan SKPD, dan form laporan masyarakat. Berikut adalah rancangan desain yang masih sederhana dan perlu terus dikembangkan lagi.







Gambar 7. Desain Interface Sistem Informasi PPS

Melalui Sistem Informasi PPS ini nantinya seluruh stakeholder di lingkungan pemerintah daerah dapat mengentry data yang antara lain berupa rencana program dan anggaran, tujuan atau sasaran program, waktu pelaksanaan yang direncanakan yang mana data rencana program tersebut akan disinkronisasikan oleh TPPS. Selain itu TPPS juga akan mengelola data base terkait dengan stunting secara komprehensif. Kemudian

untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran, TPPS juga menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi baik pada saat program berlangsung dan setelah program selesai.

4.7. Rencana Tahap Berikutnya

Sesuai dengan rencana penelitian pada tahun pertama, dimana luaran yang dihasilkan adalah: 1) Dokumen kondisi eksisting tatakelola penanganan stunting, 2) dokumen pemetaan peran pemangku kepentingan, 3) dokumen pemetaan masalah, 4) Rancangan model konseptual penanganan stunting dgn mengadopsi konsep *integrated collaboration*, 5) publikasi artikel pada Jurnal Nasional terindeks Sinta 2 *Policy and Governance Review*. Rencana tahun selanjutnya tim peneliti akan menyusun sistem informasi terintegrasi sekaligus melakukan uji coba dan diseminasi guna mendukung pengambilan keputusan dalam rangka pencegahan dan penanganan stunting di Indonesia, sehingga luaran yang dihasilkan meliputi: 1) model *integrated collaboration* dalam pencegahan dan penanganan stunting yang sudah tervalidasi, 2) Dokumen naskah kebijakan pencegahan dan penanganan stunting berbasis *integrated collaboration*, 3) Publikasi artikel pada jurnal Internasional Terindex Scopus *International Journal of Electronic Governance*, 4) HAKI, 5) Buku Monograf ber ISBN) diterbitkan oleh Penerbit KYTA anggota IKAPI.

Bab 5

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. pertama, pemerintah telah menunjukkan komitmen serius dalam menurunkan prevalensi stunting dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Perpres tersebut menekankan pentingnya intervensi yang diperlukan dan keterlibatan semua pihak dalam penyelesaian stunting secara tepat waktu, dengan target sebesar 14% pada tahun 2024. Untuk menindaklanjuti Kebijakan Presiden Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang disetujui berdasarkan Keputusan Gubernur masing-masing provinsi. TPPS beranggotakan perwakilan dari berbagai organisasi pemerintah daerah dan pusat yang terkait dengan permasalahan stunting. Meski prevalensi stunting terus menurun dari tahun ke tahun, namun kita perlu mewaspadaikan apakah pencapaian tersebut menunjukkan kinerja nyata atau hanya di atas kertas.

Masih banyak kendala yang terjadi terkait upaya penurunan stunting, baik penyebab langsung maupun tidak langsung. Faktor kendala tidak langsung antara lain lemahnya mekanisme koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait. Masih adanya egoisme sektoral antar instansi sehingga masih terjadi tumpang tindih program dan anggaran. Selain itu, database yang ada juga belum sepenuhnya akurat. Terdapat aplikasi yang dirancang untuk memudahkan pemasukan data dan pelaporan masyarakat, namun masih terpisah dan terlokalisasi dalam masing-masing instansi serta belum merupakan sistem informasi yang terintegrasi. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan rekomendasi agar dapat tercipta suatu sistem informasi yang berfungsi tidak hanya menyajikan database stunting yang akurat dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan, namun juga memudahkan koordinasi program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi. Sehingga seluruh program dan kegiatan penurunan stunting dapat terkomunikasikan dengan baik dan mempercepat proses pengambilan keputusan yang tenang dan kolaboratif.

Daftar Pustaka

- [1] Kustanto, A. (2021). The Prevalence Of Stunting , Poverty , And Economic Growth In Indonesia : A Dynamic Panel Data Causality Analysis. 6(2), 150–173. <https://doi.org/10.20473/jde.v6i2.22358>
- [2] Nong,Ryan (2021) [Wagub NTT Launching Tim Koordinasi Percepatan Penurunan AKI, AKB dan Stunting NTT](https://kumpang.tribunnews.com/2021/05/04/wagub-ntt-launching-tim-koordinasi-percepatan-penurunan-aki-akb-dan-stunting-ntt) – diakses dari [tps://kumpang.tribunnews.com/2021/05/04/ wagub-ntt-launching-tim-koordinasi-percepatan-penurunan-aki-akb-dan-stunting-ntt](https://kumpang.tribunnews.com/2021/05/04/wagub-ntt-launching-tim-koordinasi-percepatan-penurunan-aki-akb-dan-stunting-ntt)
- [3] Elan Satriawan. (2018) Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024. [PowerPoint Presentation \(tnp2k.go.id\)](https://www.tnp2k.go.id/filemanager/files/Rakornis%202018/Sesi%201_01_RakorStuntingTNP2K_Stranas_22Nov2018.pdf). Diakses dari [https://www.tnp2k.go.id/filemanager/files/Rakornis%202018/Sesi%201_01_RakorStuntingTNP2K Stranas 22Nov2018.pdf](https://www.tnp2k.go.id/filemanager/files/Rakornis%202018/Sesi%201_01_RakorStuntingTNP2K_Stranas_22Nov2018.pdf)
- [4] Habibi Center. (2021) Tantangan Percepatan Pencegahan Stunting di Era Pandemi Diakses dari : <https://mediaindonesia.com/humaniora/422848/tantangan-percepatan-pencegahan-stunting-di-era-pandemi>
- [5] Nugroho, Hermawan Cahyo; Soesilo Zauhar; dan Suryadi. (2014) Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nganjuk. *Jurnal J-PAL*, 5(1) : 12-22.
- [6] Setiawan, Beny, and Herbasuki Nurcahyanto. 2020. “Analisis Peran Stakeholder Dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Angka Kematian Ibu Studi Kasus Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.” *Journal of Public Policy and Management Review* 9(2). Diakses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/27351>
- [7] [Pendanaan Program Penurunan Stunting \(kemenkeu.go.id\)](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/). 2022. diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>
- [8] Annur, Cindy Mutia. (2023) [Ini Rincian Angka Balita Stunting di Wilayah Jawa Timur pada 2022, Kabupaten Jember Terbesar \(katadata.co.id\)](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/14/ini-rincian-angka-balita-stunting-di-wilayah-jawa-timur-pada-2022-kabupaten-jember-terbesar). diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/14/ini-rincian-angka-balita-stunting-di-wilayah-jawa-timur-pada-2022-kabupaten-jember-terbesar>
- [9] [Targetkan Stunting Jatim Turun Hingga 13,5% Tahun 2024, Wagub Emil: Intervensi Harus Sesuai Data Riil Di Lapangan- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur \(jatimprov.go.id\)](https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/targetkan-stunting-jatim-turun-hingga-13-5-tahun-2024-wagub-emil-intervensi-harus-sesuai-data-riil-di-lapangan), diakses dari <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/targetkan-stunting-jatim-turun-hingga-13-5-tahun-2024-wagub-emil-intervensi-harus-sesuai-data-riil-di-lapangan>
- [10] [Trend Data Stunting di NTT Per Agustus 2022 Turun Jadi 17,7 Persen – NTT Satu](https://www.nttsatu.com/trend-data-stunting-di-ntt-per-agustus-2022-turun-jadi-177-persen/). Diakses dari <https://www.nttsatu.com/trend-data-stunting-di-ntt-per-agustus-2022-turun-jadi-177-persen/>
- [11] Rahmadhita, Kinanti. (2020). Permasalahan stunting dan pencegahannya. *Jurnal ilmiah Kesehatan Sandi Husaha*. Vol.11 No.1 diakses dari <https://www.researchgate.net/publication/342569588> [Permasalahan Stunting dan Pencegahannya](https://www.researchgate.net/publication/342569588)
- [12] Tumilowicz, A., Beal, T., & Neufeld, L. M. (2018). *A review of child stunting determinants in Indonesia*. *October 2017*, 1–10. <https://doi.org/10.1111/mcn.12617>
- [13] Mashar, S. A. (2021). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stunting pada Anak : Studi Literatur*. VI(3), 2076–2084.
- [14] Alshidqi, Ulil A. (2022). KOPMAS : Data Stunting di Indonesia Tidak Akurat. [KOPMAS : Data Stunting di Indonesia Tidak Akurat - Serat.ID | Bertutur dengan Data](https://www.kopmas.id/berita/kopmas-data-stunting-di-indonesia-tidak-akurat-serat.id)
- [15] Nurhaeni, H., Badrin, S., & Riasmini, N. M. (2021). *Kolaborasi Penanganan Stunting*. *September*. <https://doi.org/10.46799/jhs.v2i5.158>
- [16] Purnamasari, H., & Priyanti, E. (2021). *Collaborative governance dalam penanganan stunting*. 18(3), 383–391.
- [17] Saufi,A. *Dinamika Collaborative Governance dalam Penanggulangan Stunting Ditengah Pandemi Covid-19*. *Prosiding Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan*. 2021;1(1):80-95. Tersedia dari [Dinamika Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Stunting](https://www.dinamikagovernance.com/)

- [18] **Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting). (2019) Diakses dari <https://stunting.go.id/stranas-p2k/>.**
- [19] NTT Berhasil Turunkan Angka Stunting di Tahun 2022. Diakses dari: <https://diskominfo.nttprov.go.id/2023/02/01/ntt-berhasil-turunkan-angka-stunting-di-tahun-2022/>
- [20] Islami, M. J. (2021). Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan Critical Success Factors (CSFs). *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 10(1), 13. <https://doi.org/10.31504/komunika.v10i1.3750>
- [21] Wasiat,Sofie.(2022). Hambatan Menuju Penurunan Target Stunting 14% Tahun 2024. <https://kumparan.com/sofiewasiat/hambatan-menuju-penurunan-target-stunting-14-tahun-2024-1xlt2lbSrjH/1>
- [22] Ahdiat, Adi. (2023). Ini Perkembangan Produktivitas Pekerja Indonesia 5 Tahun Terakhir. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/04/06/ini-perkembangan-produktivitas-pekerja-indonesia-5-tahun-terakhir>
- [23] Dhinisari, M.Citra. (2023). Ragam Masalah Upaya Penurunan Stunting di Tanah Air <https://lifestyle.bisnis.com/read/20231206/106/1721578/ragam-masalah-upaya-penurunan-stunting-di-tanah-air>.
- [24] Muhshiy T.M,, Supriyati dan Tri Siswati. 2021, Analisis Stakeholder Dalam Kebijakan Percepatan Dan Pencegahan Stunting Di Kabupaten Bantul, <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/210119>
- [25] <https://www.indopos.co.id/nasional/2023/01/25/kpk-temukan-tumpang-tindih-perencanaan-dan-penganggaran-stunting/>
- [26] Prasetyo, Anjar, et.al. (2023). [Stunting Convergence Management Framework through System Integration Based on Regional Service Governance](#), " *Sustainability*, MDPI, vol. 15(3), pages 1-23, January.
- [27] Khasanah, N. N., Rustina, Y., Sari, D. W. P., & Wuriningsih, A. Y. (2022). Information System Records of Nutritional Status of Stunted Children Aged Under Five: A Literature Review of Stunting Management in Pandemic Era. *Amerta Nutrition*, 6(4), 432–436
- [28] Tri Anggraeni dan Handrianus Vianey Melin Wula, (2021). Governmental Performance in Integrated Stunting Countermeasures in BorderRegions: Evidence from Timur Tengah Utara Regency. *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, Vol. 5, No. 2, December
- [29] The Integrated Collaboration Environment How Next-Generation Web Conferencing Applications Meet the Needs of the Changing Enterprise Workforce. Copyright © 2002 Wainhouse Research. & First Virtual Communications, Inc. <https://www.wainhouse.com/files/papers/WR-integ-collab-env.pdf>
- [30] [O’Neill, Luke \(2020\).Integrated collaboration environments offer new ways to work.](#) <https://www.techtarget.com/searchunifiedcommunications/feature/Integrated-collaboration-environments-offer-new-ways-to-work>